



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2022 – 2023
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat ke- : Ke – 15
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 13 Februari 2023
Waktu : 11.07 s.d. 13.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat : 1. Drs Kahar Muzakir (Ketua Komisi XI DPR RI/ F-
P.Golkar)
2. Dolfie O.F.P. (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI/F –
PDIP)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos. (Kabag Sekretariat
Komisi XI)
Acara : Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputy Gubernur
Bank Indonesia
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
43 dari 54 orang Anggota Komisi XI DPR RI
dengan rincian:

PIMPINAN

2 orang dari 5 orang Pimpinan:

1. Drs. H. Kahar Muzakir (Ketua/F – PG)
2. Dolfie O. F. P. (Wk Ketua/F – PDIP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
2. Marsiaman Saragih
3. Ir. Eriko Sotadurga B. P. S.
4. Masinton Pasaribu, S.H.
5. Dr. H. Musthofa, S.E., M.M.
6. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
7. Indah Kurnia

8. MH. Said Abdullah
9. Dr. Sihar P. H. Sitorus, BSBA, MBA
10. Marinus Gea, S.E, M.Ak.
11. I. G. A. Rai Wirajaya, S.E., M.M.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Puteri Anetta Komandin, B.Com.
2. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
3. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
4. Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si.
5. H. Muhidin Mohammad Said, S.E., M.B.A

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

6 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Heri Gunawan, S.E.
2. Susi Marleny Bachsin, S.E., M.M.
3. Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si.
4. DR. H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., M.M.
5. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
6. Bahtra

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Fauzi Amro, M.Si
2. Satori, S.Pdi., M.M.
3. H. Charles Meikyansah

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I.
2. Bertu Merlas, S.T.
3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Hj. Vera Febyanthy, M.Si
2. Ir. Marwan Cik Asan, M.M.
3. Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LLM
4. Hj. Siti Mufattahah, P.Si., M.B.A.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M.
2. H. Hidayatullah, S.E.
3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
4. H. Ecky Awal Mucharam

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Ahmad Najib Quadratullah, S.E.
2. Ir. H. Achmad Hafisz Tohir
3. Primus Yustisio, S.E., M.AP.
4. Ahmad Yohan, M.Si.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.

B. Undangan:

1. Filianingsih Hendarta, S.H., MBA.
2. Ir. Dwi Pranoto, MBM.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F – PG (Drs. H. KAHAR MUZAKIR):

Saudari Filianingsih Hendarta, S.H., MBA., serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Sesuai dengan catatan dari sekretariat, yang hadir Anggota secara fisik ada 20 orang dan kemudian fraksi ada 7 fraksi, sehingga berdasarkan Tata Tertib Pasal 157, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan. Dengan demikian rapat saya buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.07 WIB)

Jadwal kita rapat hari ini pertama kali adalah *fit and proper test* kepada Ibu yang sudah duduk di depan kita ini yaitu jam 11.00 sampai jam 12.00. Kemudian yang kedua jam 13.00 sampai jam 14.00 itu kepada Bapak Dwi Pranoto dan jam 15.00 kita Rapat Intern Komisi untuk mengambil keputusan siapa di antara dua ini yang kita pilih akan jadi Deputy Gubernur Bank Indonesia, hebat kita ini mengangkat orang kasih jabatan. Ya kan benar hebat kita ini, Ibu itu kasih jabatan mudah-mudahan ada berkahnya.

Baiklah Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Untuk itu selanjutnya rapat pimpinan rapat akan di saya serahkan kepada Pak Dolfie untuk melanjutkan. Kami persilakan Pak Dolfie.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat Pak Ketua,
Anggota Komisi XI,

Yang terhormat Ibu Filianingsih Hendarta yang sudah hadir untuk mengikuti *fit and proper test* calon Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Jadi nanti Bu Filiani agar presentasi 15 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman dari yang terhormat Bapak-Ibu Anggota sekitar 45 menit. Kami persilakan Ibu Filiani untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (FILIANINGSIH HENDARTA, S.H., MBA.):

Terima kasih Pak Dolfie.

Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kahar Muzakir, Ketua Komisi XI DPR RI,
Bapak Dolfie, selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dan juga pimpinan rapat,

Bapak-Ibu Kapoksi dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Mohon izin Bapak-Ibu, mengawali paparan ini perkenankan kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat, juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami memaparkan visi dan misi kami jika nantinya kami terpilih untuk mengemban tugas sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu terwujudnya perekonomian nasional yang tidak hanya berdaya tahan, tetapi juga progresif dan inklusif melalui akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital yang efektif dan sinergis untuk kebangkitan Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Kita tahu bahwa laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi ini terus dibayangi oleh ketidakpastian global dan ini ada akibat efek luka memar atau *scarring effect* dan juga gangguan rantai pasok. Memang alih-alih kita menjadi *fully*, kita lihat bahwa resesi ekonomi ini diiringi dengan laju inflasi yang tinggi justru berada di depan mata kita, tapi kita patut bersyukur perekonomian nasional ini masih terjaga dengan baik, ekonomi nasional bahkan sanggup tumbuh 5,31% pada tahun 2022 dan ini juga diproyeksikan tetap tumbuh 4,5 sampai 5,3% diikuti inflasi yang terkendali sesuai dengan sasaran.

Namun kita sadar bahwa tingginya ketidakpastian global ini menuntut kita terus harus waspada, terlebih lagi menimbang posisi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang terbuka. *Nah*, di sini penetapan strategi kebijakan akan menjadi pilihan yang serba dilematis. Di satu sisi kita lihat bahwa ketidakpastian pemulihan ekonomi ini menuntut kebijakan yang prostabilitas, tetapi di sisi lain kita lihat efektivitas laju pemulihan ekonomi ini menuntut kebijakan yang propertumbuhan. *Nah*, kita lihat di sini kompleksitas semakin terasa untuk Indonesia menimbang kita tahu bahwa keberagaman struktur ekonomi di Indonesia. *Nah*, perdebatan tidak lagi hanya sebatas pada antara prostabilitas atau propertumbuhan, tetapi bagaimana pertumbuhan itu sendiri mampu menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dari pusat hingga daerah.

Nah, strategi kebijakan tidak lagi bisa diramu dengan *business as usual*, kita lihat di sini perlu adanya upaya untuk bisa menangkap peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis yang ada. Setidaknya kita melihat saat ini kita punya dua perubahan lingkungan strategis yang perlu kita sikapi secara jitu. Apa itu? Yang pertama adalah adanya arus digitalisasi ekonomi dan keuangan, dan kita lihat di sini terpapar di tayangan bahwa

preferensi masyarakat ini semakin bergeser kepada layanan digital dan potensi Indonesia terbilang besar dalam hal ini, kenapa, karena hampir 70% penduduk Indonesia ini berusia produktif.

Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di tayangan itu sebagian besar persentase terbesar dan kita punya bonus demografi yang bagus di sini adalah usia produktif, kaum milenial. *Nah*, di samping itu kita juga lihat infrastruktur penopang digitalisasi pun ini semakin merata, mudah dan murah untuk diakses. *Nah*, kita lihat preferensi digital ini semakin menguat juga di masa pandemi yang lalu dan konsumen digital tercatat konsumen digital baru ini tercatat bertambah 21 juta.

Nah, hal yang kedua adalah terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang merupakan produk dari Bapak-Ibu sekalian. Demikian juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dua undang-undang ini mengubah tatanan kelembagaan di sektor keuangan. Jadi kita lihat yang pertama Undang-Undang P2SK ini menjadi *milestone* yang mengakselerasi ekonomi keuangan digital melalui apa yang pertama melalui masuknya sistem pembayaran sebagai tujuan Bank Indonesia yang mendukung pertumbuhan, dan yang kedua masuknya sistem pembayaran, yang kedua adalah keikutsertaan BPR baik yang konvensional maupun syariah dalam sistem pembayaran, dan yang ketiga adanya pengaturan rupiah digital. *Nah*, sementara itu dari Undang-Undang PDP kita juga melihat ini hadir dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perlindungan data pribadi di era digital saat ini.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Kita melihat bahwa akselerasi ekonomi keuangan digital ini muncul dia sebagai pilihan yang logis, yang diharapkan bisa menyeimbangkan antara tadi stabilitas dan pertumbuhan dan inklusivitas. Jadi kita melihat bahwa digitalisasi di dalam jangka pendek ini dia secara langsung bisa berdampak positif pada penurunan biaya transaksi dan juga peningkatan akses pasar. *Nah* sementara di jangka panjang, kita tahu digitalisasi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur produktivitas.

Nah, kita tahu bahwa yang namanya digitalisasi inovasi digital ini bila dikelola dengan tepat, dia dapat menjadi sumber pertumbuhan yang baru. *Nah*, kita lihat akselerasi digital yang inklusif ini akan membuka partisipasi ekonomi yang lebih luas dari pusat hingga daerah, dari kota hingga desa, dari usaha besar hingga mikro, serta bagi seluruh gender, dari seluruh lapisan usia, suku dan agama. Hanya dengan *smart phone*, *internet* dan listrik, kita bisa melihat bahwa tiap individu ini memiliki peluang yang sama untuk mengakses layanan ekonomi dan keuangan.

Nah, kita lihat bahwa sistem pembayaran ini merupakan *entry point* Bapak-Ibu dan sekaligus perekat dalam ekonomi keuangan digital ini. Kita lihat penyediaan infrastruktur pembayaran yang kalau *tag line* kami itu Cemumuah artinya cepat, mudah, murah, aman dan handal. *Nah*, ini berdampak positif bagi konsumen maupun pedagang.

Nah, sebagai contoh di sini, ini contoh konkrit Bapak-Ibu, Anshar itu si pedagang bakso di Bunda Kita, di Balikpapan itu penghasilannya dia naik dari 2 juta menjadi 3 juta rupiah per hari sejak dia menggunakan QRIS. Demikian juga Cokro si pedagang cilor di Jakarta omsetnya juga naik, dari 300 ribu menjadi Rp500 ribu per hari.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Untuk itu visi dan misi yang kami sampaikan di awal tadi, kami akan manifestasikan ke dalam tiga strategi pokok. Strategi yang pertama yaitu mengawal stabilitas moneter; strategi kedua, memastikan dukungan pembiayaan yang memadai; dan strategi ketiga, mengimplementasikan langkah nyata akselerasi transformasi ekonomi keuangan digital.

Nah, kita masuk ke strategi yang pertama, mengawal stabilitas moneter melalui apa, melalui pengendalian inflasi sesuai sasaran, nilai tukar yang stabil untuk ekonomi yang berdaya tahan, dan kalau kita lihat dari sisi moneter sendiri kebijakan suku bunga yang pro stabilitas ini perlu dipertahankan dan dari sisi nilai tukar pasokan devisa, pengelolaan kewajiban valas terus diperkuat. Di samping itu, pengayaan instrumen operasi moneter valas juga dilakukan termasuk juga *term* deposit valas untuk devisa hasil ekspor yang ini merupakan program besar saat ini, dan ini bisa dilakukan sesuai mekanisme pasar dan juga perluasan instrumen *hedging*, termasuk *swap hedging* syariah yang ini perlu diperkuat dan diadakan.

Di samping itu, pengelolaan Surat Berharga Negara di pasar sekunder akan dilanjutkan, ini untuk mendorong aliran masuk modal asing, dan yang berikutnya adalah koordinasi pengendalian inflasi akan tetap dimantapkan. Ini melalui optimalisasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang kita sudah lihat hasilnya dan juga penguatan TPID dan tentunya termasuk juga kolaborasi dengan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Nah, strategi kedua ini memastikan dukungan pembiayaan yang memadai dan inklusif guna untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan tentunya juga turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Intermediasi perbankan akan didorong pada sektor UMKM dan juga ekonomi hijau untuk mendukung perluasan inklusi dan keuangan yang berkelanjutan.

Nah, kondisi likuiditas ini juga perlu menjadi perhatian, jadi harus dijaga cukup longgar untuk memastikan bahwa intermediasi perbankan melalui LTV konvensional melalui FTV syariah untuk kredit dan pembiayaan property, uang muka kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor, juga penguatan efektivitas dari rasio intermediasi makropudensial. *Nah*, untuk mendukung pembiayaan UMKM, kami melihat bahwa implementasi dari kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial ini terus perlu untuk terus ditingkatkan efektivitasnya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Untuk strategi yang ketiga, ini yang menurut hemat kami sangat diperlukan ke depannya yaitu mengimplementasikan langkah nyata akselerasi transformasi ekonomi keuangan digital ini untuk mengawal momentum yang sudah terjadi saat ini jangan sampai lepas. Jadi mengawal momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, melalui apa, melalui perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Ini dimaksudkan untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan digital, baik konvensional maupun syariah, serta pembiayaan ekonomi.

Untuk itu nantinya *blue print* sistem pembayaran Indonesia 2025 ini akan kami perkuat melalui tujuh agenda prioritas yaitu:

Agenda pertama, kami akan melanjutkan reformasi regulasi dan kerangka pengawasan sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK dan Undang-Undang PDP melalui 4 program.

1. Kami akan melakukan penyesuaian regulasi sistem pembayaran sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK, terutama bagaimana Bank Indonesia harus menterjemahkan amanah yang diberikan oleh P2SK dalam kedudukan sistem pembayaran untuk tujuan Bank Indonesia. Jadi sistem pembayaran ini harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran. Ini untuk memastikan perlindungan data pribadi.
3. Penguatan *sandbox* diantaranya uji coba pemanfaatan *blockchain* untuk halal, *traceability* yang memperkuat daya saing Indonesia. Kita tahu Indonesia ini produsen *halal food* dan ini diperlukan supaya kita bisa mengoptimalkan daya saing kita.
4. Penguatan pengawasan yang terintegrasi. Jadi pengawasan tidak bisa lagi hanya untuk PJP, tetapi pengawasan mulai dari perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak terafiliasi lainnya.

Agenda kedua, kita akan melakukan pengayaan dan perluasan instrumen pembayaran digital. Ada 4 program di sini:

1. Pengembangan standar nasional kartu kredit domestik dan ini meliputi konvensional maupun syariah. Bapak-Ibu, penggunaan kartu kredit itu 80% digunakan di dalam negeri, oleh karena itu kita berpikir kenapa kita tidak mendorong kartu kredit domestik saja.
2. Pengembangan konteks *less payment*.
3. Perluasan fitur QRIS. Ini untuk mendorong ekonomi syariah termasuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sodakoh, dan wakaf atau siswaf.
4. Penguatan peran BPD Bank Pembangunan Daerah. *Nah*, ini kita akan perkuat baik BPD konvensional maupun BPD syariah untuk ekosistem pembayaran digital. *Nah*, ini nantinya bisa diselaraskan mereka bisa mendukung program-program digitalisasi pemerintah daerah.

Nah, agenda ketiga, ini modernisasi infrastruktur dari sistem pembayaran. Ini harus 3, saling terkoneksi, terintegrasi dan *interoperable*. *Nah*, ini ada tiga program di sini yaitu:

1. Perluasan BI Fast termasuk juga pengembangan fitur BI Fast, ini *fast payment cross border*.
2. Pengembangan BI RTGS Generasi 3 yang *multicurrency*.
3. Pengembangan *interoperable* infrastruktur secara bertahap. Kita akan mendorong interoperabilitas antara BI Fast dengan RTGS, lalu GPN dengan BI Fast, ini untuk mendorong efisiensi *settlement* QRIS; dan juga yang ketiga ini kita mendorong interoperabilitas antara infrastruktur sistem pembayaran dengan infrastruktur pasar keuangan. *Nah*, ini juga menjadi prasyarat dari pada saat kita nantinya akan menerbitkan rupiah digital, termasuk juga memfasilitasi transaksi lintas batas.

Nah, agenda keempat adalah standarisasi integrasi data dan juga praktik pasar melalui dua program.

1. Yang pertama adalah penguatan SNAP ini standar *open API* sistem pembayaran dan mengoptimalkan pemanfaatan data granular. Bapak-Ibu, datanya itu banyak tetapi *scammer* di mana-mana dan kami akan mengoptimalkan pemanfaatan data itu melalui integrasi infrastruktur di pasar keuangan dan juga infrastruktur data. *Nah*, nanti ini bisa akan apa digunakan untuk pengambil keputusan.
2. Yang kedua, penguatan praktik pasar. *Nah*, ini memang dilematis di mana kita menyeimbangkan kebijakan harga harus seimbang antara terus ikut mendorong efisiensi dan inovasi yang dilakukan tetapi juga menjaga *sustainability* industri. Jadi bagaimana mengimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan industri.

Agenda kelima adalah percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada tiga program Bapak-Ibu di sini.

1. Yang pertama adalah perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, ini kita maksudkan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah, penerimaan asli daerah,
2. Yang kedua adalah akselerasi digitalisasi Bansos, ini kita akan menggunakan prinsip *customer centric omnichannel* interkoneksi dan interoperabilitas, serta memanfaatkan pusat data terintegrasi.
3. Yang ketiga adalah akselerasi digital modal dan ekosistem transportasi, jadi melalui integrasi pembayaran digital dan penerapan teknologi nirsentuh di seluruh daerah. Jadi tolnya ibaratnya kalau orang Jawa mengatakan *mbludus* tidak perlu berhenti, jadi ini *multi lane free flow*, jadi ya *loss Pak*, jadi *enggak* perlu berhenti mobilnya.

Nah, yang kedua itu agenda keenam. *Nah*, kita melihat bahwa penguatan sinergi kebijakan ini menjadi satu kepastian. Sinergi menjadi satu

kepastian. Di sini ada dua program, kita mensinergikan QRIS dengan inisiatif pemerintah, baik gerakan bangga buatan Indonesia, gerakan bangga berwisata di Indonesia saja, atau P2DD tadi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. *Nah*, Ini semua dimaksudkan untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri khususnya UMKM serta pembayaran di destinasi pariwisata. dan yang kedua adalah perluasan cakupan kerjasama QRIS antarnegara. kita akan perluas ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke India, ke Tiongkok dan ke Saudi Arabia. Jadi Bapak-Ibu nantinya *hopefully* kalau pergi umroh, pergi haji tidak perlu membawa Riyal lagi, cukup membawa HP asal saldonya diisi ya.

Nah, berikutnya agenda ketujuh Bapak-Ibu, kita menjaga kedaulatan rupiah dan penguatan literasi digital melalui dua program. *Nah*, kita melakukan satu penguatan kedaulatan rupiah. Ini sebagai upaya untuk memastikan terlayannya kebutuhan uang kartal karena kan kita masih memerlukan uang kartal hingga menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah yang terluar, terdepan dan terpencil dan juga tentunya sinergi dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan rupiah digital melalui proyek Garuda.

Dan yang kedua adalah penguatan perlindungan konsumen dan literasi digital melalui PSBI tematik. Ini merupakan aksi nyata Bapak-Ibu dalam membuka akses pembiayaan dan akses pasar melalui ketersediaan dukungan teknologi digital. Kami memiliki pengalaman pada saat kami melakukan kampanye QRIS, itu membuktikan bahwa *seeing is believing* dan mereka mengatakan literasi digital itu akan sulit diaplikasikan kalau tidak ada dukungan digitalnya. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau masyarakat tidak mempunyai *smartphone*, literasi digital tinggal literasi, tetapi tidak bisa diterapkan terutama untuk masyarakat yang tertinggal dan *signal* yang agak lemot, begitu. *Nah*, literasi digital tanpa aplikasi nyata adalah sia-sia. *Nah*, oleh karena itu, kami menawarkan PSBI yang tematik akan menjadi jembatan untuk menghadirkan *seeing is believing* tersebut.

Nah, Bapak-Ibu implementasi ketiga strategi di atas, ini membutuhkan dukungan kelembagaan yang kokoh melalui reformasi kelembagaan secara holistik dengan tiga agenda prioritas.

1. Yang pertama adalah transformasi organisasi.
2. Yang kedua, transformasi SDM berbasis digital.
3. Yang ketiga, penguatan sinergi dan kolaborasi kelembagaan untuk pemangku kepentingan melalui penguatan sinergi dengan K/L, industri, terutama dengan DPR khususnya Komisi XI, dan *institutional leadership* Indonesia di kancah internasional. Agenda transformasi digital dalam presidensi Indonesia di G20 tahun lalu akan terus diperjuangkan dalam Asian Chairmanship Indonesia di tahun 2023.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang berbahagia dan kami muliakan,

Demikian paparan atas pokok-pokok pemikiran kami. Sebagai penutup perkenaan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,

atas kesempatan yang sangat baik ini. Kiranya kita semua dapat menyumbangkan pengabdian yang tulus kepada bangsa tercinta ini, amin. Sekian, terima kasih.

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom.
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

Boleh saya tutup dengan satu pantun Pak? Dengan satu pantun boleh Pak? Ya.

Sarapan pagi pakai kue bantal,
Sambil ngopi disiapkan barista andal,
Kami siap bersinergi mendorong inovasi digital,
Untuk mengantar ekonomi Indonesia fenomenal.

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Filianingsih.

Ini *suppoter*-nya *nggak* masuk kantor ini Bu? Tidak mengurangi KPI ini?

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (FILIANINGSIH HENDARTA, S.H., MBA.):

From anywhere Pak, work from anywhere.

KETUA RAPAT:

Baiklah Bapak-Ibu Anggota yang terhormat, tadi kita sudah mendengarkan, mencermati pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Filianingsih Hendarta mengenai memperkuat stabilitas dan mengakselerasi pertumbuhan inklusif digitalisasi dan sinergi sebagai poros bauran kebijakan. Tiba saatnya kepada Bapak-Ibu Anggota yang terhormat untuk melakukan pendalaman. Kesempatan pertama kepada Fraksi PDI Perjuangan, Pak Andreas siapa?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Ya untuk Fraksi PDI Perjuangan, kesempatan pertama kepada Bu Indah. Silakan Bu Indah.

KETUA RAPAT:

Oh ya, silakan Bu Indah.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Sesama perempuan.

KETUA RAPAT:

Perempuan dukung perempuan ini sepertinya.

F – PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pak Andreas, saya mendapat kehormatan untuk bisa menyapa Bu Fili.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XI, serta tentu saja fraksi balkon pendukung yang luar biasa dari pagi lebih heboh dari kita, Bu Fili yang saya hormati,

Terima kasih untuk pemaparan yang bagus. Tadi saya sebenarnya mau menanyakan tentang literasi *tok* tanpa implementasi kan ya bingung juga karena gap kemampuan atau literasi digital bagi masyarakat kita kan masih cukup jauh, tapi tadi Ibu sudah langsung menjawab di yang terakhir pemaparan tadi bahwa Ibu akan mengusulkan jika Tuhan izinkan dan kami memilih Ibu sebagai Deputy Gubernur, Ibu akan mengusulkan tentang PSBI yang tematik sehingga bisa itu menjawab kemungkinan akan terjadi *gap* terhadap literasi khususnya yang digital. Bukan hanya kepada daerah yang terluar 3T tadi, tetapi juga bagi kami di tempat kami pun masih banyak sekali orang yang masih belum *well literated* terhadap itu semua. Jadi sehingga saya tidak menanyakan tentang itu dan saya tahu bahwa Ibu merupakan salah satu yang membidangi tentang sistem pembayaran produk, program yang ada di Bank Indonesia, sehingga kita semua dimudahkan pada saat pandemi kemarin ada QRIS, ada kemudian terakhir ini yang sangat menguntungkan ada BI Fast dengan biaya yang murah dengan slogan yang Cemumuah itu.

Pertanyaan saya sekarang beralih kepada yang lain Bu yaitu kondisi tentang likuiditas. Dana asing di SBN terus menurun, itu kan bagian dari strategi yang ditempuh untuk menghadapi *cost of fund*. Konsepsinya SBN mengandalkan pembiayaan dalam negeri, jika kondisi ekonomi dan kita amini membaik, maka serapan kredit akan baik juga otomatis kan, sehingga likuiditas bank akan terserap ke kredit. Pada masa pandemi kemarin likuiditas bank membantu menyerap SBN. Saat ini kemungkinan besar likuiditas bank itu akan terbagi selain untuk SBN, tapi juga mengucurkan kredit untuk masyarakat. Bagaimana Bank Indonesia membantu menyerap SBN jika bank tidak lagi menyerap SBN seperti di masa pandemi kemarin?

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Indah.

Kesempatan berikutnya Fraksi Partai Golkar, Pak Muhidin. Silakan Pak Muhidin.

F – PG (H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua.

Silakan Pak, supaya jangan didengar.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Muhidin.

F – PG (H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID, S.E., M.B.A.):

Pak Dolfie yang saya hormati,
Ibu Fili yang saya hormati,
Rekan-rekan sekalian yang sangat berbahagia hari ini.

Tadi setelah kita mencermati paparan Ibu Fili, saya lihat cenderung lebih banyak menyangkut masalah digitalisasi dan ini kelihatannya Bu Fili punya konsen di sini *nih* dan ini sangat menarik sekali, dan inilah memang saatnya sekarang ini yang harus kita bagaimana memasyarakatkan digitalisasi ini, dan saya kira sebentar lagi bank tradisional ini akan segera terganti dengan praktik layanan bank digital untuk menghadapi perubahan tersebut maka terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh *stakeholder* industri keuangan digital.

Yang pertama, literasi tentang digital. Saat ini literasi atau pemahaman atas bahan digital masih sangat minim untuk masyarakat khususnya Indonesia dan pada khususnya lagi untuk masyarakat menengah ke bawah Bu, padahal segmen tersebut adalah segmen terbesar mengingat sebanyak 48% atau 97,7 juta orang dewasa di Indonesia masuk kategori *unbanked* atau tidak tersentuh oleh bank, ini data dari World Bank. Pertanyaannya apa strategi Ibu nanti apabila Ibu Fili terpilih menjadi Deputi Bank Indonesia?

Saya kira cukup satu Bu, sebenarnya banyak yang perlu kita tanyakan, tetapi *insya Allah* mudah-mudahan Ibu terpilih nanti baru kita lebih banyak berdiskusi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Muhidin.

Kesempatan berikut Fraksi Partai Gerindra, Pak Heri Gunawan siap Pak?

F – P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Kawan-kawan Komisi XI yang saya hormati,
Bu Fili, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan.

Secara umum kalau kita melihat Bu Fili di dalam Undang-Undang P2SK itu mengamanatkan tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kami melihat kinerja Bank Indonesia di tahun 2022 ini relatif belum optimal. Indikatornya yang pertama kita lihat nilai tukar rupiah terdepresiasi, bahkan kurang lebih nyaris di atas 9%. Yang kedua, inflasi yang meroket dan tinggi tentunya jauh di atas target 3% plus minusnya. Yang ketiga, transaksi QRIS masih relatif kecil dan kurang diminati oleh masyarakat. Yang keempat terkait pertumbuhan ekonomi yang berbicara di atas 3% katanya, namun konsumsi rumah tangga, sektor pertanian dan industri itu belum kembali ke level sebelum pandemi. Rasio kredit UMKM berkisar masih ada di atas ataupun berkisar diantara 20% jauh yang ditargetkan oleh Pak Presiden mencapai 30%.

Dengan catatan di atas, bisa disimpulkan tiga strategi Bank Indonesia yang Ibu sampaikan terkait tantangan kebijakan yaitu *pro stability*, *pro growth*, dan inklusi, kami melihat belum menunjukkan kinerja yang optimal.

Kalau kita lihat setelah kita membaca materi yang disampaikan oleh Ibu Fili sebagai calon Deputy Gubernur Bank Indonesia, Ibu melalui visi dan misi terwujudnya perekonomian nasional yang berdaya tahan, progresif dan inklusif melalui akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital yang efektif dan strategi untuk kebangkitan Indonesia. Itu bahan yang tadi ibu paparkan. Ini yang akan dimanifestasikan dengan strategi pokok mengawal stabilitas moneter, yang pertama. Yang kedua, Ibu ingin memastikan dukungan pembiayaan ekonomi yang memadai dan inklusif, dan yang ketiga implementasi transformasi ekonomi dan keuangan digital.

Dalam mengintervensi nilai tukar rupiah kita juga tentunya paham di mana intervensi melalui *domestic non deliverable forward* atau DNDF di pasar valuta asing domestik itu tentunya tidak akan berdampak pada cadangan devisa kita, tapi di semester II tahun 2022 nilai tukar rupiah ini kan bergerak sangat tinggi, sangat tajam, di mana ini katanya imbas akibat kenaikan suku bunga dari bank sentral secara global. Mau *enggak* mau tentunya BI juga harus melakukan intervensi Bu Fili.

Nah, di halaman 18 yang Ibu paparkan di sini, di mana Ibu menyatakan pengayaan instrumen operasi moneter valas dilakukan termasuk *term* deposit valas dari devisa hasil ekspor sesuai mekanisme pasar dan perluasan instrumen *hedging*, termasuk *hedging* syariah seperti *swap hedging* syariah, pengelolaan SBN di pasar sekunder dan untuk mendorong kembali masuknya aliran investasi portfolio asing yang terus didorong.

Yang ingin kami coba tanyakan ke Bu Fili yang pertama sebagai calon Deputy Gubernur Bank Indonesia, tentunya Ibu memiliki satu strategi selain kebijakan yang sudah ada untuk pengelolaan nilai tukar rupiah ini, langkah dan mitigasi apa yang akan Ibu lakukan dan Ibu tawarkan jika terpilih sebagai calon Deputy Gubernur Bank Indonesia? Tentunya ini kami butuhkan karena hal ini menyangkut potensi kenaikan suku bunga yang digembar-gemborkan seperti suku bunga bank sentral global dan risiko resesi dunia, termasuk daya tarik dollar dan tentunya akan tinggi terhadap perekonomian Indonesia.

Hari ini Ibu Fili menjabat sebagai Asisten Gubernur BI atau Kepala Departemen Sistem Pembayaran. Setelah kita baca di makalah Ibu di halaman 19 sampai halaman 26 yang terkait sistem pembayaran, di mana narasinya saya akui sangat bagus, ada yang telah direalisasikan seperti QRIS, elektronik sistem pembayaran atau BI Fast, BI RTGS gen ketiga, namun hal ini seperti membangun sistemnya, namun aksesnya tidak merata Bu. Ibu juga tadi sampaikan yang naik turunnya internet dan lain sebagainya Bu, begitu loh Bu. Yang ingin coba kami tanyakan, bagaimana calon Deputy Gubernur Bank Indonesia ini tidak hanya membangun sistem pembayaran yang kuat dan berkelanjutan dan aman, melainkan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan?

Dan satu catatan terakhir yang mungkin saya coba ingin tahu, sampai hari ini inflasi masih relatif tinggi, bahkan di Januari 2023 tingkat inflasi mencapai 5,28%. Beberapa komoditas berfluktuatif misalnya beras dan minyak goreng, padahal dalam Undang-Undang APBN di 2023 itu menetapkan target inflasi di angka 3% plus minus 1.

Undang-Undang P2SK mengamanatkan BI untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan mengacu pada sasaran inflasi yang sudah ditetapkan kurang lebih 3 plus minus 1. Saya ingin tahu Bu, menurut Ibu, bagaimana efektivitas GNPIP atau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dalam mengatasi inflasi ini dan bagaimana GNPIP ini mengatasi naiknya harga beras dan minyak goreng Bu.

Saya pikir mungkin cukup sekian Pimpinan untuk sementara, nanti kalau ada pendalaman berikut kita akan coba mendalami kembali. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Heri Gunawan.

Kesempatan berikut kepada Fraksi Partai Nasdem. Nasdem? Lagi sosialisasi? Fraksi PKB, PKB?

Pak Bertu, silakan.

F – PKB (BERTU MERLAS, S.T.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Yang saya hormati Ibu Filianingsih Hendarta,

Saya dari awal sampai akhir menyimak apa yang Ibu sampaikan, saya masuk duluan tadi Pak. Saya *standby* tadi dari awal sampai akhir selesai saya menyimak, menyimak apa yang telah disampaikan Ibu Fili, bahwa apa yang disampaikan ini saya salut lah Bu ya, ini lengkap, lugas, tegas, jelas semuanya ada di situ. Fraksi balkon tepuk tangan sekali lagi dong.

Saya sampai bingung Pak Muhidin mau tanya apa sama Bu Fili ini, tapi ada, ada sesuatu Bu Fili, bahwa sekarang ini digitalisasi yang sudah ada di negara kita ini sudah saya kira sudah cukup maju Bu, mulai dari QRIS bisa bayar pakai pakai *barcode aja* begitu kan, saya pun *enggak* ngerti Bu, saya pun *enggak* ngerti, *enggak* terlalu paham tentang itu. *Nah*, pertanyaannya bagaimana orang-orang masyarakat Indonesia warga negara Indonesia yang di 3T itu tadi?

Kita belajar digitalisasi ini mulai dari buka rekening tanpa ATM zaman dulu Bu, punya ATM, terus bisa m-banking, *nah* itu kan masuk digitalisasi ya, kita digitalisasi itu dari tahapan seperti itu. *Nah*, sementara sebagian dari warga negara Indonesia ini bahkan nomor rekening pun *enggak* tahu, *enggak* punya Bu. *Level* berikutnya itu apa itu ke ATM belum pernah.

Bu, ada cerita bahwa ada di dari program dari Kemensos namanya PKH Bu (Program Keluarga Harapan), itu petugas yang ngambilin ATM itu Bu mereka itu *enggak* kebanyakan *enggak* ngerti cara *ngambil* ATM. Itu pendamping PKH lah yang ke ATM *ngambilin nyabut* satu-satu, satu-satu. Artinya ada bagian masyarakat kita yang seperti itu.

Nah, saya ingin dengar dari Ibu ya, dari Ibu Fili bahwa bagaimana caranya bilamana Ibu duduk sebagai deputi gubernur, kesenjangan kemampuan teknologi digitalisasi itu tadi bisa agak seimbang lah Bu ya. Bukan berarti digitalisasi modern itu di-*stop*, tapi orang-orang yang pengetahuannya belum sampai dengan digitalisasi menjadi berpengatahuan lebih baik.

Saya kira demikian saja Pimpinan. Terima kasih banyak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam.

Terima kasih Pak Bertu. Berikutnya Fraksi Partai Demokrat, Pak Marwan.

F – PD (Ir. H. MARWAN CIK ASAN, M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat,
Ibu Fili yang saya hormati,

Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu bahwa Ibu telah dipilih oleh Gubernur Bank Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk hadir mengikuti *fit and proper test* calon deputy gubernur. Saya pikir ini impian semua pegawai Bank Indonesia Bu dan tidak semua orang bisa mencapai duduk di situ. Jadi saya apresiasi bahwa Ibu terpilih dan bisa duduk di situ adalah sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Fili.

Pada *paper* yang Ibu sajikan, saya membaca tentang visi terkait tiga strategi ini mengawal stabilitas moneter, kemudian memastikan dukungan pembiayaan ekonomi yang memadai dan inklusif, kemudian merumuskan dan mengimplementasikan langkah konkret, mengakselerasikan transformasi EKD.

Ibu Fili ya, seperti kita ketahui bersama bahwa negeri kita baru selesai melandai dari badai Covid-19. *Alhamdulillah* syukur dengan kerja sama dan kerja keras semua komponen bangsa yang diayomi oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kita bisa melewati badai ini dengan kondisi yang baik.

Dalam Perpu tersebut salah satu perintah konstitusi yang disampaikan kepada Bank Indonesia adalah membeli Surat Berharga Negara di pasar primer atau yang lebih kita kenal dengan istilah *burden sharing*. Melalui SKB 1, 2, dan 3, total dana pembelian SBN adalah 1.144 triliun. Dana inilah yang sebagian katakanlah hampir seluruh program penanggulangan Covid baik dampak social, ekonomi, maupun kesehatannya kita gunakan. Kita bersyukur bahwa BI *standby* dan siap mendukung dan menopang pemerintah dalam mengatasi Covid-19 yang lalu.

Nah, namun demikian Ibu, kalau kita lihat rata-rata jatuh tempo dari SBN ini adalah 5 atau 8 tahun dari sekarang. Artinya setidaknya tahun 2025 sudah akan mulai jatuh tempo dari pada SBN yang kita lakukan untuk menangani Covid-19. Ini tentu akan menjadi beban yang berat baik bagi pemerintah maupun bagi Bank Indonesia. Pemerintah tanpa membayar *burden sharing* ini pun sudah harus mengeluarkan dana setidaknya 500 triliun per tahun, belum lagi kewajiban Bank Indonesia. Yang kita khawatirkan adalah *surplus* yang dimiliki Bank Indonesia tidak cukup untuk menanggung beban yang akan diterimanya.

Pertanyaan saya adalah kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia manakala nanti waktu jatuh tempo SBN ini sudah sampai pada waktunya kita harus melakukan pembayaran? Itu yang pertama.

Yang kedua, meskipun tidak lagi diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena memang masa Covid adalah berakhir di tahun

2023 undang-undang ini berlaku, tetapi Undang-Undang P2SK itu kembali mewajibkan Bank Indonesia untuk melakukan *burden sharing* atau pembelian SBN di pasar primer. Ini tentu akan lagi menjadi beban Bank Indonesia.

Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini dan bagaimana upaya BI agar penugasan ini tidak mengganggu fungsi utamanya dalam rangka menjaga moneter kita karena sesungguhnya *burden sharing* ini pada aktualnya adalah merupakan penambahan *netto* kuantitas uang yang ada di masyarakat yang kalau tidak kita kelola dengan baik ini akan mengancam inflasi kita dan inflasi ini adalah tugas utamanya Bank Indonesia. Jadi strategi yang tepat yang akan diterapkan oleh Ibu dan teman-teman di BI supaya kalau ini terjadi lagi penugasan, saya *sih* berharapnya tidak terjadi ya Bu, jangan ada lagi krisis-krisis itu begitu *loh* ya biar kita tenang membangunnya. *Nah*, tetapi kalau terjadi bagaimana, strategi seperti apa yang akan dilakukan supaya tugas dan fungsi Bank Indonesia menjaga inflasi itu tidak terganggu?

Saya pikir itu Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih Pak Marwan.

Berikutnya Fraksi Partai PKS, Bu Anis atau Pak Hidayatullah? Bu Anis, silakan.

F – PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati, Ibu Filianingsih, selamat sudah bisa hadir di sini Ibu, terima kasih paparannya sangat lengkap.

Santai saja Bu Fili, tenang, dari tadi kok senyumnya belum mengembang ya setelah ditanya-tanya. *Eenggak*, waktu presentasi waktu presentasi tegap begitu, begitu satu-satu nanya tegang, santai saja Bu Fili. Ya, ya betul.

Yang pertama ini tentang independensi Bank Indonesia. Ini menjadi fokus kita ketika pembahasan di Panja RUU PPSK ya, kita sangat berkepentingan dengan bagaimana Bank Indonesia dapat menjalankan independensinya. *Nah*, ada satu pasal di Undang-Undang PPSK itu Pasal 9

ayat (1) bunyinya “Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan undang-undang ini”. Ayat (2)-nya “Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”. Itu dua ayat terkait dengan independensi.

Yang saya tanyakan itu yang di ayat (1) ada penambahan frasa di situ, penambahan frasanya kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan undang-undang ini. Itu nomor satu. *Nah*, ini Ibu Fili sebagai calon Deputy Gubernur Bank Indonesia bagaimana pandangan Ibu Fili terkait dengan independensi Bank Indonesia dengan adanya penambahan frasa tadi “Kecuali untuk hal tertentu yang secara tegas diatur dengan undang-undang”. Itu yang pertama ya.

Kemudian kalau dari sisi Bu Fili sendiri idealnya itu independensi Bank Indonesia itu seperti apa gambarannya ya dan juga transparansi tentu saja.

Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan kompetensi Bu Fili ini ya di bidang digital tadi, saya mendengar beberapa teman-teman mengatakan bahwa ada Pak Muhidin, ada Pak Bertu terakhir tadi ya bahwa Indonesia ini masih ada persoalan-persoalan begitu ya terkait dengan digitalisasi ya, termasuk bahwa di beberapa daerah ini atau banyak daerah itu belum siap ya untuk *go digital*, masih banyak ya *blank spot* di berbagai daerah, sehingga proses digitalisasi ini tidak dapat berjalan secara semestinya.

Nah, kemudian juga di halaman yang depan ini di *slide* terkait dengan potensi Indonesia, ini ada *e-commerce* di situ. Saya ingin soroti secara khusus tentang *e-commerce* ya. Perkembangan *e-commerce* tentu menggembirakan, tapi ada satu survei yang menyebutkan ya, ini surveinya Sakernas, Sakernas tahun 2020 ya itu bahwa pengguna *e-commerce* di Indonesia itu kalangan *richest*, kalangan orang-orang yang punya, kalangan *the have* itu menggunakannya 64%, sedangkan kalangan *poorest*, kalangan orang-orang yang tidak punya itu hanya 19% yang menggunakan internet untuk keperluan bisnisnya.

Jadi teknologi digital itu dalam hal ini memang banyak digunakan oleh orang-orang yang kelompok-kelompok yang di atas begitu ya, sedangkan yang kelompok-kelompok yang di bawah itu hanya 19% yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis, sehingga salah satu yang menjadi dampak, dampak, kan kalau kita tidak hanya melihat dampak positif ya Bu Fili ya, satu dampak lain daripada *e-commerce* itu atau bisnis menggunakan internet adalah makin meningkatkan kesenjangan ekonomi ya, karena yang menggunakan digital itu memang sangat sedikit kurang dari 20%, 18,92% tepatnya bisnis yang menggunakan internet itu dari kalangan miskin. *Nah*, ini bagaimana Bu Fili melihat fenomena ini karena tadi di akhir digital untuk semua kan begitu Bu Fili ya, dan saya hargai itu apresiasi bahwa Bu Fili tahu bahwa ada kondisi-kondisi yang memang tidak untuk semua. Digital itu untuk orang berpunya dan bahkan ketika WFH kemarin itu yang bisa WFH itu

orang-orang yang bisa WFH, sedangkan masyarakat miskin harus berjibaku tiap hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Nah, ini memenuhi visi Bu Fili untuk digital untuk semua, sedangkan kondisinya seperti ini, ini apa strategi-strategi karena saya lihat di sini strateginya belum mencakup ke sana ya, ini lebih kepada bagaimana membangun yang Indonesia yang *go digital* tapi masyarakat jangan sampai ditinggal, masyarakat yang tidak punya ini yang apa jangan sampai nanti *e-commerce* itu atau bisnis itu justru meningkatkan kesenjangan ya yang kaya makin kaya, yang miskin malah semakin miskin ya. Saya kira itu dulu Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Ibu Anis.

Fraksi PAN, silakan Pak Primus.

F – PAN (PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak-Ibu yang saya hormati,
Ibu, selamat datang di Komisi XI.

Saya juga membaca bahan yang diberikan oleh Ibu, menarik ini Bu, apalagi halaman pertama. Seperti kita ketahui pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 itu 5,31% dan di bawahnya ditulis tertinggi sejak 2013. *Nah*, itu betul memang dan inflasinya 5,51%. Kalau mau jujur ini juga yang tertinggi sejak 2013, walaupun di bawah proyeksi 2022. *Nah*, ini *enggak* usah dijawab Bu.

Saya ada dua pertanyaan. Pertama, saya menggunakan data semuanya, data ini diambil dari risetnya Google di Singapura menggunakan perusahaan BN Company. Dikatakan bahwa jadi berapa *sih* persentase masyarakat di Asia Tenggara di setiap negara *nih*, negara di Asia Tenggara yang menggunakan jasa keuangan khususnya perbankan, ternyata tetap juaranya Singapura karena populasi dia juga terkecil dan mereka kan negara maju begitu *loh* dan Indonesia lagi-lagi menduduki urutan terakhir. Jadi 81% yang belum tersentuh Bu. Kalau kita urut dari paling belakang Philippines berikutnya 75%; Vietnam 54; Thailand 46; Malaysia 28%; kalau Singapura 12%. *Nah*, itu bukan kita *enggak*, *enggak fair* lah kalau disandingkan dengan Singapura.

Nah, dari data ini kan begitu besarnya, artinya kalau di kita kalkulasi dengan jumlah penduduk yang 19% yang menggunakan jasa keuangan ini, ada sekitar hampir 60 juta dan 60 juta ini dipastikan itu lebih dari 3 rekeningnya di bank-bank yang berbeda, akhirnya bisa menutupi jumlah populasi di Indonesia. *Nah*, lupakan yang itu, yang saya ingin tanyakan adalah akses ini untuk masyarakat. Ini kan tadi *nyambung* seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bertu dan Bu Anis sebenarnya bahwa banyak UMKM kita karena tadi di pemaparan Ibu, bahan Ibu ini berbicaranya UMKM. Memang benar. Bagaimana akses mereka, apa masalahnya ini. Mereka tahu sudah dilayani, tapi bukan sama yang formal. Mereka melakukan dengan jasa-jasa yang informal yang lainnya, sehingga masalahnya di mana-mana, bunga suku bunganya luar biasa, bahkan yang *enggak* berbadan hukum pun seperti rentenir atau apapun itu. *Nah*, saya ingin mendengar dari Ibu apa langkah-langkah terobosan ini ke depannya supaya tersentuh ke pelosok ke seluruhnya.

Yang kedua Ibu, sebelum pandemi itu jumlah UMKM kita itu hampir 80 juta, itu data dari Kominfo, setelah pandemi terakhir itu di 2000 tahun lalu itu 2021 56 juta, 2022 ini naik menjadi 64,2 juta, artinya mulai kembali. Tetapi UMKM yang tadi kan Ibu digitalisasi ya semuanya menggunakan apa *online* ya kan, terus juga menggunakan QRIS. *Nah*, itu baru tersentuh dari 64 juta itu 17,1%, artinya baru 10 juta UMKM, sisanya 53 juta ini belum tersentuh. *Nah*, ini apa terobosannya Bu? Kenapa? Mungkin alat teknologinya kurang canggih atau mungkin sosialisasinya kurang, mungkin juga ada ketidakpercayaan dari pelaku UMKM yang mikro Bu ya itu dia. Mungkin itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam.

Berikutnya kepada Fraksi PPP, P3? Bu Wartiah.

F – PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi XI beserta Rekan-rekan Anggota Komisi XI,

Yang kami hormati tentu Ibu Fili,

Saya langsung saja Bu. Saya membaca biodata Ibu ini, saya memberikan apresiasi karena ternyata Ibu sudah mendapatkan penghargaan *the best chain leader* pada program transformasi BI mulai dari 2016, 2017, 2018 sampai 2022. Itu artinya kinerja Ibu luar biasa dan kami berharap ke depan bisa terus ditingkatkan.

Kemudian saya langsung ke pertanyaan Ibu. Dari paparan yang Ibu sampaikan secara keseluruhan kami juga mengapresiasi, namun kami ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, yang berhubungan dalam 7 program kerja sistem pembayaran yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dengan daerah-daerah yang belum siap atau daerah tertinggal, bagaimana mengantisipasinya ke depan, strategi apa yang Ibu akan lakukan?

Kemudian tadi saya tertarik mengenai tentang *halal food* yang Ibu tawarkan. Sebagai calon Deputy Gubernur BI kami mohon penjelasan programnya seperti apa yang Ibu tawarkan?

Kemudian saya langsung saja ke yang ketiga, tadi Ibu juga menawarkan bahwa ada penguatan dan pengembangan pembayaran sistem pembayaran QRIS ya sampai ke Arab Saudi untuk meringankan para jamaah haji dan umroh menggunakannya di sana. Saya kira ini sangat menarik dan kami ingin bertanya jika Ibu terpilih nanti, kapan akan dilakukan itu karena lebih cepat lebih baik.

Saya kira saya tidak berpanjang kalam, sudah banyak yang menanyakan. Itu saja pertanyaan ringkas dari kami dan secara keseluruhan kami tentu berharap mengenai pengalaman Ibu selama ini, hal-hal apa saja yang Ibu temui dalam kesulitan di pekerjaan Ibu sehingga ke depan terus diantisipasi untuk meminimalisirnya?

Dan terakhir lebih baik saya akhiri dengan pantun Bu ya. Ini fraksi balkon saya minta bilang apa ya, cakep.

Judika terkenal jadi penyanyi,
Judul lagunya menusuk hati,
Jika Ibu Fili terpilih nanti,
Jangan lupa visi dan misi.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

F – PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIA):

Lah Judikanya ke mana Judikanya?

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Wartiah.

Demikian Bapak-Ibu Anggota, semua fraksi sudah menyampaikan pendalaman. Kalau dilihat ini ada 14 topik yang menjadi atensi Bapak-Ibu Anggota, mulai dari yang apa namanya makro sampai kepada digitalisasi. Jadi tadi ada pertanyaan terkait dengan likuiditas dikaitkan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam hal SBN dan kredit.

Kemudian yang banyak ditanyai adalah soal literasi, literasi dikaitkan dengan inklusi, dikaitkan dengan kesenjangan, dikaitkan dengan akses di daerah. Kemudian juga ada bagaimana langkah mitigasi terkait stabilitas nilai tukar, sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemudian bagaimana efektivitas GNPIP terkait inflasi.

Kemudian tadi ada pertanyaan tentang *burden sharing* yang akan jatuh tempo dikaitkan dengan beban BI dan strategi mengatasinya, termasuk dengan penugasan-penugasan *burden sharing* yang mungkin apabila terjadi di masa yang akan datang bagaimana BI memitigasinya. Ada pertanyaan terkait dengan independensi BI, kemudian *halal food* dan layanan umroh berbasis digital.

Sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini literasi keuangan menurut data OJK, literasi keuangan itu mencapai 50%, tetapi inklusi keuangannya 85%. Jadi yang melek itu lebih rendah daripada yang mendapatkan layanan, sehingga di situlah dengan adanya gap itu digitalisasi kadang-kadang merugikan nasabah ataupun konsumen.

Baik Bu Filia, kita beri waktu karena ada 14 pertanyaan, paling banyak 25 menit ya Bu untuk merespon apa yang menjadi atensi Bapak-Ibu Anggota. Silakan Ibu Filia.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (FILIANINGSIH HENDARTA, S.H., MBA.):

Terima kasih Pak Ketua.

Mohon izin untuk merespon tadi Bu karena banyak sekali Bu, jadi menyimak tadi Bu. Jadi *enggak* sempat senyum tadi menyimak. Mungkin saya akan gabung beberapa ya Pak ya, mungkin digabung.

Tadi terima kasih untuk pertanyaan dari Anggota Dewan dari PDIP Ibu Indah, dari Golkar Pak Muhidin dan juga dari Gerindra Pak Heri Gunawan, dan juga tadi dari PKB Pak Bertu, dan juga pertanyaan dari Demokrat Pak Marwan Cik Asan dan juga dari PKS Bu Wartiah, oh PPP maaf, maaf, maaf Bu iya, lewat, Bu Anis, iya Bu Anis, Bu Anis. Tadi *enggak* sempat senyum Bu ya Bu Anis dari PKS, Bu Anis dan dari PAN Pak Primus, dan juga dari P3 Ibu Wartiah. Iya Pak.

Nah, mungkin tadi yang terkait dengan Bu Indah, Ibu memang kalau kita lihat ini saat ini beda kondisinya perbankan dengan krisis-krisis sebelumnya Bu. Saat ini kalau kita lihat AL per DPK perbankan itu cukup tinggi Bu sekitar 31,2. Jadi dia punya alat likuid yang banyak dan juga *capital adequacy ratio*-nya itu sekitar 25. Jadi mereka mempunyai permodalan yang cukup kuat. *Nah*, jadi kalau misalnya tadi waktunya saat ini untuk menyalurkan kredit begitu ya, asal ada yang meminta kredit begitu, permasalahannya bukan mungkin perbankan bukan tidak mau menyalurkan kredit, tetapi juga industrinya sendiri juga masih *wait and see* untuk meminta kredit itu sendiri.

Nah, apakah Bank Indonesia bagaimana Bank Indonesia menyikapi ini dan Bank Indonesia sebetulnya dengan penerapan GWM kita sudah melihat bahwa waktu itu sudah ada waktu kita untuk secara perlahan untuk menormalisir likuiditas yang tadinya digelontorkan. *Nah*, ini likuiditasnya akan kita serap kembali secara bertahap, tetapi tanpa mengganggu kemampuan dari bank itu menyalurkan kredit. Jadi Bank Indonesia bisa menggunakan SBN-SBN itu sebagai alat operasi moneter dari Bank Indonesia. Jadi saat ini pun Bank Indonesia menggunakan melakukan kontraksi, melakukan ekspansi di operasi moneter itu juga menggunakan SBN-nya.

Nah, berikutnya kami juga melihat bahwa tadi rata-rata dari pertanyaan Bapak-Ibu sekalian mengenai digitalisasi. Bapak-Ibu, memang orang seringkali memperdebatkan tadi seperti Bu Anis katakan apakah digitalisasi ini justru menambah memperbesar kesenjangan? Ini hanya terjadi di Indonesia.

Kalau kita bicara dengan teman-teman di Asean ataupun di dengan bank sentral yang lain, di Indonesia digitalisasi di Indonesia dimulai dari lapisan terbawah. Jadi digitalisasi di Indonesia bukan milik kalangan atas atau yang kaya. Apa itu buktinya? Karena digitalisasi ini seperti tadi saya katakan ini *entry point*. Tadi contoh saya pedagang cilor, pedagang bakso, itu dia menikmati digitalisasi, juga Bansos juga dinikmati digitalisasi dan juga kartu prakerja segala macam itu merupakan digitalisasi. Jadi digitalisasi di Indonesia ini milik kalangan bawah Bu justru, itu dimulai dengan situ.

Nah, yang paling mudah orang mengatakan tapi *enggak* bisa buka rekening, digitalisasi tidak perlu harus buka rekening. Kalau kita lihat *entry point* itu adalah QRIS, uang elektronik itu adalah *entry point*, berapapun Ibu/Bapak punya 10.000 Bapak-Ibu sudah bisa melakukan itu, tetapi yang tadi saya katakan yang diperlukan itu adalah medianya, bagaimana mereka punya *enggak* mereka *smartphone*? Punya *enggak* mereka alat untuk itu? Kalaupun mereka punya, *signal*-nya kuat *enggak*? Kalau *signal*-nya *enggak* ada *enggak* kuat.

Nah, makanya saya mengatakan PSBI yang tematik itu bisa menjembatani hal itu, ditambah dengan program kerja kita yang merupakan literasi dan edukasi yang nyata ya. Jadi kita mengatakan ibaratnya gini Bapak-Ibu, sudah *enggak* zaman lagi kita cuma ngomong-ngomong saja begitu ya, ibaratnya saya memberikan ilustrasi begini, kalau orang kita mengatakan mengajari orang cara memancing ikan, kita mengatakan pakai pancing ikan, harus ada umpannya, harus ada jalannya, harus ada kailnya, dan yang diedukasi dia bilang *nggih* mengerti, iya *dos pundi*? Begitu ya. Lalu pertanyaannya *so what*, saya *enggak* punya jala, saya *enggak* punya kail, saya *enggak* punya umpan. *Nah*, yang diperlukan adalah itu penyediaan itu. *Nah*, pada saat mereka sudah bisa menggunakan kailnya, umpannya mereka dapat ikan, *nah* ini ketemu masalah lagi, jual ke mana ikannya ini, ikannya banyak. *Nah*, ini yang diperlukan, kita sudah menyediakan ada yang menampung ikannya. *Nah*, pada saat mereka melihat bagaimana harga ikannya, nanti akan ada harga-harga yang terdigitalisasi itu ada referensi-referensi. *Nah*, yang seperti itu yang kita katakan.

Jadi saya sependapat dengan Bapak-Ibu bahwa kita harus bersama-sama untuk meningkatkan literasi dan digitalisasi dengan memberikan yang tadi bantuan yang nyata begitu, apa begitu.

Nah, saya punya literasi dan edukasi kita yang kita akan lakukan dengan kebijakan-kebijakan kita. Kita akan ada satu paket yang kita datang kepada sekelompok UMKM misalnya, kalau dulu kita kan hanya edukasi ke UMKM *ngomong* saja begitu. Setelah itu kita bilang ya sampai ketemu ya, ya sudah habis itu lupa mungkin, tapi kita akan datang bersama dengan bank, dengan nonbank, bila perlu dengan *e-commerce* dan juga misalnya nanti bagaimana mem-*packaging* yang bagus atau memfoto yang bagus begitu. *Nah*, setelah itu kita langsung habis edukasi kita langsung bukakan rekening, bila perlu kita langsung bukakan dia untuk bisa bertransaksi di *e-commerce*. *Nah*, itu itu paket yang kita sampaikan Bu.

Nah, tadi yang Bu Anis katakan ini tadi data itu data 2020 Bu ya sebelum pandemi Bu, tetapi dengan adanya pandemi data itu sudah berubah.

F – PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Itu data setelah pandemi karena judul penelitiannya itu adalah Covid-19 dan Ketimpangan Ekonomi.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (FILIANINGSIH HENDARTA, S.H., MBA.):

Oke ya, iya, iya Ibu. Justru *tagline* kita, kita melihat digitalisasi itu digitallisasi untuk semua. *Nah*, kalau Ibu lihat saat ini Bu, itu mohon maaf *nih* kalau misalnya apa namanya asisten pembantu rumah tangga kita itu sudah belanjanya di *e-commerce loh* Bu juga dan banyak orang-orang yang itu belanjanya di *e-commerce*. *Nah*, kita melihat justru ini membuka kesempatan, jadi pembelinya terbuka, kesempatannya penjualannya juga terbuka dan mereka mulai jadi di *e-commerce* itu dia menyediakan berbagai sistem pembayaran. Jadi artinya tidak perlu orang itu harus punya rekening. Jadi dia bisa COD (*Cash On Delivery*). *Nah*, yang seperti itu.

Nah, menurut hemat saya ini juga nanti kita akan dorong bersama-sama karena yang tadi teman-teman di *e-commerce* juga melakukan sosialisasi begitu untuk kalangan bawah. Kalau Ibu lihat iklan-iklan yang diambil itu bukan memakai iklan-iklan artis-artis yang kalangan atas begitu ya, tapi memakai yang di kalangan bawah yang lebih merakyat, itu itu Bu yang dilakukan dan mudah-mudahan nanti bersama-sama kita bisa meningkatkan literasi itu Ibu.

Nah, yang terkait tadi seberapa efektif GNPIP tadi, Bapak-Ibu kita lihat bahwa GNPIP itu kan kita ada 4K yang ingin kita jangkau yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi yang efektif. Jadi kita akan bersama-sama dengan Pemda di sini juga mengoptimalkan anggaran dari K/L dari Pemda untuk operasi pasar. Jadi tadi yang harga-harga yang meningkat itu mungkin kita akan bersama-sama untuk mengatasi hal itu dan juga optimalisasi distribusi pangan, jadi

penguatan infrastruktur juga dan beberapa tadi penguatan ketahanan komunikasi utamanya hortikultura dan juga apa penguatan pasokan pangan strategis lainnya.

Nah, berikutnya tadi Pak Muhidin katakan, literasi Pak tidak harus tadi dari *unbank* Pak, tidak harus dari bank, tetapi juga bisa *unbank* dan untuk UMKM bagaimana strategi kita untuk mengangkat UMKM.

Bapak-Ibu,

Tadi kami katakan bahwa digitalisasi sistem pembayaran itu merupakan *entry point*. *Nah*, pada saat mereka sudah mengenal digitalisasi itu seperti pedagang cilor dan bakso tadi, itu transaksi dia menggunakan QRIS itu terakumulasi dan *ter-capture* oleh Bank Indonesia, dan kami akan menggunakan transaksi tersebut untuk kita analisis dan kita akan membentuk *credit profile* dan salah satu kelemahan dari UMKM, mereka itu tidak memiliki agunan yang cukup. *Nah*, nanti dengan *credit profile* itu, itu yang bisa dipakai pada saat mereka membutuhkan pembiayaan dari bank maupun nonbank itu dia bisa memberikan tadi *customer consent* bagi bank itu untuk meminta bagaimana *credit profile* saya dan itu akan membantu.

Nah, jadi ada *step-step* yang akan kita tempuh tadi UMKM dia tahap awal dia mengenal sistem pembayaran digital, setelah itu dengan adanya *credit profile* kita mulai dia naik kelas untuk mendapatkan pembiayaan digital. *Nah*, setelah itu kita naik kelas lagi bagaimana dia melakukan transaksi penjualan dia bisa *go export* dan yang lain-lain. Jadi itu ada tahapan untuk naik kelas.

Nah, sekali lagi memang kita melihat bahwa ini yang harus diupayakan bersama-sama. Jadi ada sinergi dari program-program dari K/L dan juga dukungan daripada DPR sendiri untuk hal ini, terutama untuk digitalisasi.

Nah, berikutnya kami melihat juga di sini. *Nah*, tadi pengelolaan nilai tukar, Bapak-Ibu menurut hemat saya kita harus ada tiga hal yang kita harus perlu lakukan. Yang pertama, kita harus tetap optimis karena kita melihat bahwa kita punya modal yang bagus di Indonesia, kita punya pertumbuhan yang baik. Nilai tukar meskipun berfluktuasi, tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain ini jauh lebih baik dan kita NPI kita yang baik, *export* kita yang baik dan ada tadi bonus demografi dan digitalisasi, digital *mindset* yang sudah mulai bergulir, ini menjadi modal besar kita. Tetapi memang kita harus waspada karena memang kita *open* ekonomi, jadi akan bisa terjadi *spill over*, ada dampak-dampak yang itu yang harus kita terus waspadai dan Bank Indonesia bersama dengan KSSK itu selalu melakukan memonitor kita mempunyai *protocol management crisis* dan kita punya indikator-indikator itu, dan kita melakukan simulasi bersama untuk mencegah tadi untuk mitigasi baik nilai tukar maupun inflasi itu kita melakukan hal tersebut.

Nah, berikutnya yang terkait dengan bagaimana menyikapi SBN tadi, SBN jatuh tempo Bapak-Ibu dan bagaimana Bank Indonesia yang dikatakan tadi independen, tapi transparan dan bagaimana pendapat saya. Bank

Indonesia memang sesuai dengan amanat yang diatur undang-undang dikatakan independen, tetapi sekali lagi Bank Indonesia adalah bagian dari negara ini dan apabila negara ini memanggil ada kebutuhan yang lebih besar seperti yang kita hadapi saat kemarin, di mana semua *hand in hand*, yudikatif, legislatif, eksekutif dan itu secara serentak kita satu arah dan itu bisa terjadi dan menurut hemat saya hal ini yang harus dilakukan karena itu merupakan modal yang besar. Dan apa yang terjadi Bapak-Ibu itu kemarin bagaimana cara Indonesia mengatasi krisis dan pandemi Covid tadi itu menjadi referensi bagi negara lain. Pada saat kita forum internasional atau *credit rating agency* datang, mereka memberikan pujian atas *gercep*-nya tadi terutama dari Bapak-Ibu di DPR dan Komisi XI dan Banggar yang melakukan gerakan cepat untuk hal tersebut.

Nah, mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Oh ya satu lagi yang Bu Wartiah yang mengatakan apakah bagaimana tadi bisa untuk QRIS itu Ibu, kita maunya bisa cepat Bu, kalau bulan depan bisa kita siap Bu, yang belum siap Saudi Arabianya Bu. Jadi dia sistemnya yang belum siap, tetapi kita terus akan duduk bersama karena memang sudah ada keinginan dari mereka. Jadi ini yang kita akan dorong terus.

Nah, tadi Ibu apa kira-kira tadi *traceable halal chain* tadi. Mungkin Bapak-Ibu mengalami pada saat Bapak-Ibu pergi ke luar negeri, Bapak-Ibu susah untuk mendapatkan restoran halal atau mungkin ada keraguan begitu. *Nah*, ini yang kita akan tawarkan Ibu. Jadi untuk wisatawan kalau datang ke Indonesia dia tidak lagi ragu, karena produk halal kita itu bisa di-*trace* mulai dari dia misalnya Bu ya pemotongannya, cara memotongnya halal, lalu cara memasaknya juga halal, *packaging*-nya juga sampai di ujung. *Nah*, karena kita tahu kita produsen halal *food* terbesar Bu. *Nah*, ini yang mungkin kita punya ada *room* yang bisa kita dorong untuk hal tersebut. Mungkin itu Ibu.

Dan sekali lagi ada untuk informasi Bapak-Ibu yang tadi selain dari PSBI tematik, kita itu punya Bliss Bapak-Ibu, jadi itu yang bisa diakses. Jadi ini *one stop learning* secara *online* dari Bank Indonesia. Jadi UMKM siapapun bisa mengakses itu karena orang kadang malu-malu bertanya dan ini bisa diakses secara diam-diam, jadi sendiri-sendiri mengakses, misalnya UMKM bagaimana cara membuka rekening, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara memotret yang baik, bagaimana mengajukan ke MUI untuk sertifikasi halal dan untuk ke BPOM. *Nah*, itu yang kita tawarkan juga, di samping kita juga punya 46 kantor cabang Bank Indonesia yang siap mendukung literasi digitalisasi yang kita akan jalankan bersama.

Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Filianingsih atas pemaparannya.

Demikianlah Bapak-Ibu Anggota untuk menjadi bahan pertimbangan kita nanti dalam memutuskan siapa calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yang akan kita pilih. Kepada Ibu Filianingsih atas nama Pimpinan dan

Anggota Komisi XI kami ucapkan terima kasih telah mengikuti *fit and proper test* siang hari ini. Nanti akan dikabarkan apa keputusan dari Komisi XI. Ibu dapat meninggalkan tempat. Ya, silakan Bu Fili.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (FILIANINGSIH HENDARTA, S.H., MBA.):

Beli cilor di Pasar Jumat,
Bayarnya jangan lupa pakai QRIS,
Bapak-Ibu yang terhormat,
Semoga BI dan Komisi XI semakin bersinergi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Filianingsih.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.):

Pak Ketua, tepukan di atas paling luar biasa.

F – PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Tenaganya banyak banget yang di atas.

KETUA RAPAT:

Mungkin yang kedua juga luar biasa ini pendukungnya.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (FILIANINGSIH HENDARTA, S.H., MBA.):

Itu berbagai dari lapisan yang berbeda-beda Bapak-Ibu, ada dari *ladies banker*, ada dari teman saya PCPM masuk Bank Indonesia, ada dari Satker-satker yang lain, pensiunan juga ada dan media juga ada.

Terima kasih.

F – PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIA):

Itu ada Bu Diah itu.

KETUA RAPAT:

Bapak-Ibu yang terhormat,

Kita lanjut atau kita istirahat dulu? Makan siang ya makan siang? istirahat dulu. Kita endapkan dulu lah. Kita endapkan dulu ya. Kita skors kita kembali ke sini jam jam jam 13.30? 13.30, kita skors sampai jam 13.30.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.28 WIB)

KETUA RAPAT:

Yang kami hormati Pak Dwi Pranoto,
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.

Siang hari ini kita akan melanjutkan *fit and proper test* terhadap calon Deputy Gubernur Bank Indonesia. Tadi kita men-skors rapat, maka pada kesempatan ini skors kami cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 13.35 WIB)

Baiklah Pak Dwi, nanti Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan apa yang akan Bapak lakukan apabila terpilih menjadi calon menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia. Kesempatan kepada Bapak nanti agar presentasi 15 menit, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pendalaman dari yang terhormat Bapak-Ibu Anggota 45 menitan.

Baik Pak Dwi silakan Pak, kami persilakan.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (Ir. DWI PRANOTO, MBM.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi XI DPR RI, Bapak Dolfie,
Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastlastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Shalom.

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kami diberi kesempatan beraudiensi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang telah berkenan menerima kami kembali untuk memaparkan visi dan misi sebagai calon Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Visi dan misi ini merupakan kristalisasi pemikiran selama kami berkarya di Bank Indonesia guna memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam perekonomian. Upaya untuk terus memperkuat peran strategis Bank Indonesia ini menjadi semakin penting dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK.

Dalam undang-undang baru ini, Bank Indonesia mendapat penguatan mandat untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan tentunya turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Ssecara keseluruhan izinkan kami merangkum visi dan misi tersebut dalam paparan berjudul “Sinergi Menuju Indonesia Maju”. Pemaparan visi dan misi ini akan kami sampaikan dalam tiga bagian: Bagian pertama lebih banyak mengulas kinerja dalam proses perekonomian Indonesia, potensi dan tantangan yang dihadapi; bagian kedua memaparkan arah penguatan kebijakan Bank Indonesia; bagian ketiga mengelaborasi strategi dan agenda prioritas sejalan dengan visi dan misi tersebut.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami hormati,

Daya tahan ekonomi Indonesia kembali menghadapi ujian di tengah gejolak ekonomi global yang semakin meningkat. *Alhamdulillah* patut kita syukuri ekonomi Indonesia tetap solid. Jadi seperti yang kita lihat sama-sama ya. Ekonomi Indonesia 2022 mampu tumbuh lebih tinggi dan di sini yang menggembirakan adalah terjadi hamplr di semua wilayah atau kita katakan *broad base*. Stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan juga tetap kuat. Inflasi di seluruh daerah terkendali, dengan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga dan kinerja neraca pembayaran Indonesia tetap sehat. Selain itu ketahanan sistem keuangan nasional pun tetap kuat.

Pada tahun 2023, prospek pertumbuhan ekonomi bernuansa optimis, diprakirakan tetap berdaya tahan, inflasi menurun kembali ke sasaran dan kinerja positif neraca pembayaran kita terus berlanjut. Namun di sini menjadi catatan kita semua kita tetap perlu waspada karena paling tidak ada tiga tantangan yang menyelimuti kita. Pertama, dalam jangka pendek risiko ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Kedua, struktur perekonomian Indonesia dalam masa transisi perlu semakin kuat dan bernilai tambah. Ketiga, dalam jangka menengah kita menghadapi tantangan untuk memperkuat ekonomi dan keuangan hijau atau *green economy*.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,

Kami memandang tantangan tersebut dapat kita sikapi dengan manfaat paling tidak ada tiga peluang, sehingga ekonomi Indonesia dapat semakin berdaya tahan, tumbuh tinggi dan berkelanjutan. Yang pertama keyakinan pelaku ekonomi terhadap ekonomi Indonesia terus meningkat. Kedua, perkembangan teknologi digital juga yang semakin pesat. Ketiga, keberadaan UMKM *go digital go global* ekonomi syariah dan hijau ini yang sangat menjanjikan untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru kita yang inklusif dan berkelanjutan.

Tentunya pemanfaatan ketiga peluang tersebut memerlukan sinergi yang kuat antar seluruh *stakeholders* kita. Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi nasional telah terbukti mampu menjadi bantalan gejolak

ekonomi kita, sekaligus akselerator pemulihan ekonomi selama tiga tahun terakhir ini. Kompleksitas permasalahan perekonomian menyiratkan bahwa kebijakan pengelolaan makro ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kami bisa garis bawahi di sini bahwa sinergi kebijakan yang telah baik selama ini perlu dilanjutkan dan kalau perlu ditingkatkan agar menjadi elemen strategis dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian kita.

Berdasarkan pengalaman kami mengkoordinasikan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia se-nusantara, perlu sinergi sangat krusial di sini dalam mengawal perekonomian. Implementasi kebijakan pusat tidak bisa berjalan secara optimal apabila tanpa ada mekanisme operasionalisasi daerah yang lebih solid.

Pelajaran saya petik selama ini menunjukkan bahwa kekuatan dalam mensinergikan peran pusat daerah akan sangat strategis dalam membumikan kebijakan yang ditempuh, sehingga transmisi kebijakan Bank Indonesia semakin kuat dan memberikan nilai tambah yang terus semakin meningkat.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan dalam balutan sinergi kita ini tidak hanya untuk pertumbuhan domestik yang lebih tinggi, namun juga menjadi lebih inklusif dan terasa di seluruh lapisan masyarakat kita.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Berangkat dari spirit tentang pentingnya sinergi, kami meyakini penguatan kebijakan perlu terus dilakukan, termasuk untuk kebijakan Bank Indonesia, untuk itu kami menyelaraskan visi kami dengan visi Bank Indonesia untuk menjadi bangsa sentral digital terdepan, Bank Indonesia juga perlu terus berperan strategis dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, sistem pembayaran dan sistem keuangannya dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Paling tidak di sini ada tiga misi yang kami coba jewantahkan yang dengan tiga kata kunci ketahanan, kebangkitan dan kesinambungan.

Misi pertama lebih menekankan bahwa kebijakan yang ditempuh dengan didukung inovasi yang kuat akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Jadi di sini kebijakan makro ekonomi perlu inovatif, terukur, dan berdampak masif. Hal ini mengingat sumber kerentanan stabilitas makro ekonomi tidak semata-mata dapat diselesaikan oleh semua kebijakan reguler Bank Indonesia, banyak faktor lain yang bisa dipengaruhi oleh eksternal, khususnya dalam konteks di sini adalah tekanan harga pangan dan energi global di tengah masih merebaknya isu ketahanan pangan daerah.

Kami mempertajam strategi pengendali inflasi di sini yang bersifat *quick wins* melalui penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi pangan. Misi kedua kebijakan ditujukan pada upaya untuk mempercepat kebangkitan ekonomi Indonesia nasional menuju Indonesia maju melalui penguatan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran dan

transformasi sektor riil. Jadi saya kira ini harus penting ini untuk kami garisbawahi untuk sektor riil ini.

Berikutnya misi ketiga, kebijakan diarahkan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana mandat baru Bank Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Konsistensi dari implementasi berbagai inovasi dan sinergi kebijakan ini yang akan ditempuh untuk membahas sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti UMKM, *go global, go digital*, ekonomi syariah dan hijau akan terus dipertahankan dan diperkuat. Untuk itu optimalisasi peran kantor perwakilan kami di daerah di seluruh nusantara akan menjadi elemen penting.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Meneruskan gagasan dari tiga kata kunci penguatan arah kebijakan Bank Indonesia tadi, perkenankan kami menyampaikan tujuh strategi beserta agenda prioritas yang bisa ditempuh. Ketujuh strategi itu sebenarnya untuk memudahkan saja kita bisa singkat di sini SINERGI, dengan filosofi bahwa seluruh strategi yang dilakukan menggambarkan sinergi bauran kebijakan antar pemangku kepentingan atau *stakeholders*, tidak hanya sinergi antar lintas kementerian kelembagaan pusat daerah, tapi juga peran tentunya peran dari Komisi XI DPR RI Bapak-Bapak-Ibu yang terhormat di sini.

Strategi pertama terkait dengan stabilisasi. Dalam kaitan ini stabilisasi harga melalui upaya pengendalian inflasi pangan akan terus dilakukan secara terukur. Jadi kita di sini sudah punya contoh menarik untuk tahun 2022 yang namanya GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) yang terus digaungkan pada 2022 lalu. Kesuksesan GNPIP ini akan terus kami perkuat dan diamplifikasi ke depannya melalui pengendalian inflasi yang bersifat struktural, *forward looking* dan berbasis digital, tentunya di sini dengan memperhatikan juga *local content*-nya. Salah satu program unggulan adalah hilirisasi pangan strategisnya yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan, namun diarahkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Nah, strategi kedua berkaitan dengan inovasi. Jadi di sini dalam konteks terus dilakukan inovasi agar untuk menjaga stabilitasi nilai tukar atau inovasi yang sudah dilakukan ada TD untuk ini tentunya akan kita terus lanjutkan dan terus kita kembangkan lebih lanjut.

Strategi ketiga terkait dengan navigasi. Kita perlu terus menavigasi untuk pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor prioritas. Kami mendukung sangat mendukung hilirisasi. Jadi saya kira ini satu kata kunci hilirisasi adalah *game changer* kita. Peran BI untuk program hilirisasi termasuk penguatan riset dan kajian untuk mengidentifikasi komoditi komoditas potensial juga akan bisa kita dorong dan kita lakukan.

Kalau kita fokuskan untuk konteks itu, kajian hilirisasi biji logam antara nikel, bauksit, tembaga, batubara, kita bisa fokuskan di beberapa wilayah Bali Nusra, Kalimantan, Sulampua, sementara untuk hilirisasi perkebunan di sini

konteksnya paling kental adalah seperti CPO, karet kita bisa dorong untuk wilayah Sumatera. Untuk *local value chain* dan atau *global value chain*, kita borong bisa dorong untuk industri-industri yang medium dan *high tech*. Jadi kita bisa lihat banyak di kawasan Jawa, tentunya nanti Sumatera juga beberapa area. Untuk sektor kelautan *nih* saya kira untuk wilayah Sulampua menjadi kata kunci karena memang di sana sangat luas untuk perikanannya.

Nah, tentunya semua kajian atau rekomendasi atau analisis atau kita buat bisnis-bisnis modelnya bisa menjadi suatu masukan atau rekomendasi strategi kebijakan yang bersifat *quick wins* dalam forum rakor pusat dan daerah dalam pengembangan sektor-sektor prioritas ini.

Dalam mendukung hilirisasi ini, kami juga akan terus meningkatkan kapasitas UMKM untuk dapat memenuhi standar industri nasional dan global. Jadi di sini kami ambil salah satu contoh saja bagaimana Bina Mitra Usaha Tani di Kabupaten Jember sudah mampu bermitra dengan PT Indofood, tentunya nanti banyak contoh-contoh lain dari binaan-binaan kami yang sudah masuk ke jajaran *local* dan *global value chain*-nya.

Selanjutnya kami juga turut mendukung pengembangan sektor pariwisata. Jadi di sini pariwisata juga menjadi hal yang sangat penting, beberapa sudah dilakukan hampir di semua 46 KPWDN sudah mendorong sektor-sektor pariwisata ini. Tentunya kita kaitkan juga dengan dukungan terhadap gerakan bangga berwisata di Indonesia saja. Beberapa desa wisata, sarana hunian pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk juga DPSP Mandalika kemarin juga terus menjadi contoh-contoh bagaimana kita mengembangkan destinasi pariwisata yang super-super prioritas.

Strategi keempat untuk eskalasi, di sini bisa kita angkat untuk digitalisasi ya. Jadi pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah sudah lengkap di 542 Pemda di Indonesia yang terus kita akan dorong dan kita gerakan bersinergi tentunya dengan kementerian/lembaga terkait, juga untuk meningkatkan elektronifikasi transaksi Pemda dan juga mengakselerasi jumlah Pemda yang digital.

Kami berkoordinasi dengan Kemenko Marves, Kemendagri dan OJK juga memperkuat dukungan 46 KPWDN dalam mempercepat implementasi kartu kredit pemerintah domestik oleh Bank Pembangunan Daerah, serta memfasilitasi sosialisasi terkait akseptasi KPP domestik ini untuk belanja Pemda, khususnya di UMKM. Selain itu, percepatan digitalisasi ini juga akan terus dilakukan pada sektor transportasi di daerah. Kami juga akan terus mengoptimalkan sinergi 46 KPWDN ini untuk berhubungan dengan penyedia jasa pembayaran atau PJP di daerah dan terus mengakselerasi capaian-capaian QRIS oleh masyarakat, pemanfaatan BI Fast dan juga beberapa inovasi yang dalam waktu dekat terus akan kita kembangkan dan juga beberapa sudah jalan, seperti *Cross Border QR Payment Linkage* melalui QRIS maupun LCT pada negara-negara ASEAN dan tentunya akan terus dikembangkan. Bahkan beberapa KPWDN juga terus menggaungkan ini dengan menggunakan *event-event* internasionalnya seperti yang dalam

waktu dekat adalah F1 *Powerboat* di Sumatera Utara, Piala Dunia U20, dan maupun keketuaan ASEAN kita.

Melengkapi upaya digitalisasi tersebut, kami akan memperkuat aspek perlindungan konsumen paling tidak di empat langkah strategis, baik yang sifatnya untuk pengaturan dan kebijakan, pengawasan, penanganan pengaduan, maupun edukasi dan literasi. *Nah*, kembali di sini tentunya kami akan koordinasi dengan pihak terkait termasuk juga dengan OJK.

Yang kelima *refocusing*, jadi kita di sini juga kembali kita akan *refocusing* untuk aspek investasi dan perdagangan kita sudah punya RIRU, kita punya 14 *Regional Investment Relations Unit* yang ada di daerah dan kita punya RIRU di pusat maupun nanti GIRU Global Investment Relations Unit yang ada di 5 kantor perwakilan kita di luar negeri, ini sangat aktif tapi kita akan fokuskan promosinya untuk sinergis jadi lebih ke sinerginya, *targeted* maupun *outcome oriented*. Beberapa nanti sifatnya juga *green project*. Jadi di sini kalau kita bisa lihat *clean and clear project*-nya juga sudah mulai banyak.

Kami juga akan mendorong perluasan pembentukan *hub* ekspor untuk akses pasar komoditas unggulan, menyusul keberhasilan kolaborasi Bank Indonesia dengan Kemendag. Jadi di sini kita sudah bentuk Indonesia House of Bean di Tokyo, jadi saya kira ini menjadi *hub export copies speciality* nanti akan terus kita bisa replikasi di tempat-tempat lain.

Nah, strategi keenam untuk ke yang hal yang sangat krusial juga adalah masalah *green economy*. Jadi di sini penguatan kebijakan keuangan hijau terus kita dorong, kebijakan makroprudensial hijau untuk mendukung *sustainable finance* juga kita bangun. Pengembangan model bisnis juga kita dorong. Jadi untuk UMKM dan juga pelaku ekonomi syariahnya ya saat ini baru 990 UMKM hijau, tentunya nanti kita perlu akselerasi ini bersama Bapak-bapak dan Ibu Anggota Komisi XI. Selanjutnya juga akan kita dorong untuk investasi hijau di daerah-daerah mana yang melalui RIRU. Jadi RIRU ini menjadi kata kunci juga.

Nah, strategi ketujuh dan yang terakhir ini berhubungan dengan makna inklusif. Jadi di sini kita akan melakukan pembahasan secara UMKM secara *end to end*. Jadi pendampingan UMKM kita masih di 46 KPwDN ini baru mencapai 1.500. Jadi saya kira perlu kita akselerasi agar bisa terasa manfaatnya untuk membangun ekonomi yang inklusif di kedepannya. Juga kita dorong UMKM yang *cluster* pangan, sekaligus untuk mengatasi pengadaan inflasi di daerah dan juga kembali untuk aspek-aspek ekspor kita kaitkan dengan lokal dan global *value chain*-nya.

Selanjutnya kami juga terus komitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, baik untuk memperkuat pengembangan instrumen pasar uang Syariah maupun sektor keuangan sosial syariah di *level* pusat. Kami juga akan memperkuat peran ke 46 KPwDN dan pengembangan *halal value chain*-nya, ekosistem sistem halal maupun akselerasi seperti sertifikasi-sertifikasi halal kita. Beberapa program *quick wins* bisa kita lakukan,

termasuk juga untuk di Rumah Potong Hewan yang ada tersebar di seluruh Indonesia.

Pada sektor makanan halal penguatan ditempuh melalui pengembangan bisnis model pangannya berbasis komunitas. Beberapa kita bangun untuk berbasis di pesantren untuk meningkatkan produktivitas juga produksi dari pangan itu sendiri. Sektor *fashion* juga sangat maju, di sini kita juga membangun *end to end*, bahkan *modest fashion international*, *modest fashion*-nya kita sudah canangkan *into motion*-nya ini dan 3 tahun ke depan menjadi kelas dunia.

Nah, sebagai penutup Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, demikian paparan pemikiran kami terkait visi misi dan strategi. Kami menyadari bahwa berbagai arah dan strategi kebijakan yang kami kemukakan tadi tentunya perlu dikoordinasikan dan disinergikan lebih lanjut dengan berbagai pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, termasuk juga dengan Bapak-bapak dan Ibu Anggota Komisi XI yang kami hormati.

Sebagai penutup, perkenanan kami sekali lagi menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Demikian, semoga setiap ikhtiar tulus kita untuk memberikan sumbangsih terbaik kepada negeri tercinta senantiasa diridai oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kemarin saya masih punya PR pantun *nih* Pak Ketua. Boleh izin pantun? Saya kemarin di FGD kurang pantun itu.

Keindahan negeri memikat hati,
Membuat mata dunia selalu tertuju,
Sinergi merupakan harga mati,
Demi mewujudkan Indonesia maju.

Demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Dwi Pranoto atas pemaparannya. Ini bawa pendukung juga ini. Jadi Pak Dwi menyampaikan tentang Sinergi Menuju Indonesia Maju yang diimplementasikan dalam tujuh strategi yang disingkat juga dengan kata sinergi mulai dari stabilisasi harga, inovasi instrumen, navigasi pertumbuhan ekonomi, eskalasi digitalisasi, *refocusing* strategi investasi, *green economy* dan inklusi keuangan.

Baiklah Bapak-Ibu, kesempatan kepada yang terhormat Bapak-Ibu Anggota untuk melakukan pendalaman. Kesempatan pertama kepada Fraksi PDI Perjuangan, siapa Pak Andreas?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Fraksi PDI Perjuangan kesempatan diberikan kepada Pak Musthofa, silakan Pak Musthofa.

F – PDI PERJUANGAN (Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan yang sungguh saya hormati,
Bapak-Ibu Anggota Komisi XI,
Utamanya kepada Pak Dwi Pranoto yang dapat kesempatan kali ini untuk mengikuti *fit and proper* di Komisi XI.

Nampaknya sesuatu apa yang disampaikan oleh Pak Dwi Pranoto ini, kalau melihat tadi apa yang disampaikan dengan judul Sinergi Menuju Indonesia Maju ini, dari tujuh hal ini karena saya melihat bahwa Pak Dwi ini adalah orang yang sangat amat fasih terhadap kewilayahan, kalau melihat apa paparan ini tadi. Kenapa saya katakan fasih karena terus terang pertama menyangkut soal Kantor Perwakilan Wilayah Daerah Bank Indonesia, yang kedua sinergi tentang TPID dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun daerah.

Ya saya berpikir sederhana, saya akan mengambil untuk salah satu pertanyaan ini yaitu kalau nantinya seandainya Bapak ini terpilih jadi seperti Deputy Gubernur Bank Indonesia ini, berbicara tentang stabilitas harga melalui upaya pengendalian inflasi pangan secara terukur, ini kan tidak menjadi sebuah hiasan ya. Saya katakan tidak menjadi sebuah hiasan karena apa faktanya pada sampai saat ini bahwa persoalan inflasi ini munculnya ini bukan hanya berbicara tentang seperti di BPS, angka-angka yang muncul kita hitung kita lihat setelah itu baru disampaikan, tapi persoalannya ini kalau lah seandainya Bapak ini nanti terpilih, mampukah akan memimpin di wilayah itu untuk memutus mata rantai? Karena terus terang bicara inflasi ini adalah kata kuncinya yang di mata rantainya saja karena dari dari sana ke sini dari sini balik lagi ke sini lagi, kan begitu saja, sehingga itulah muncul harga itu faktanya sampai hari ini bahwa harga gabah dan beras ini juga naik tinggi. Ya kalau apakah ini dari perdagangannya atau dari mana, tapi faktanya jelas itu terus tidak akan pernah muncul. Itu pertama.

Yang kedua, mungkinkah atau adakah keberanian seorang Pak Dwi Pranoto ini ketika memberikan *supporting* kepada kantor wilayah, memberikan tambahan untuk mengusulkan bagaimana anggaran di kantor wilayah perwakilan daerah ini untuk Bank Indonesia itu bisa ikut mengendalikan. Jadi TPID ini tidak hanya sekedar untuk rapat berbicara diskusi, tapi ada sesuatu yang dilakukan dengan pola untuk pemberian subsidi yang cukup.

Dua hal ini Pak yang menjadi *concern* kami karena saya melihat Pak Dwi ini terlalu sering juga ke wilayah dan juga paham tentang UMKM, sehingga kami juga melihat fakta-fakta ini. Harapan saya jangan sampai nanti

soalnya terpilih itu ya jangan hanya sekedar ini untuk apa ini, untuk apa, melunasi membatalkan kewajiban saja, untuk melaksanakan *fit and propert* ini ya.

Saya rasa itu Pak Dwi yang perlu menjadi *concern* kami karena kami terus terang dikatakan daerah ini akan negara ini akan baik dan maju kalau diawali dari mulai desa sampai di tingkat pusat. Kalau lah pusat ini hebat tapi karena di wilayah tidak ada dampak dan rasanya ya apa pun yang kita diskusikan di sini ini tidak akan terasa apa pun dan tidak memberi manfaat sesuatu kepada masyarakat secara langsung, karena terus terang di sini Sinergi Menuju Indonesia Maju, majunya adalah maju bersama bukan maju kepada tertentu.

Saya rasa itu Pimpinan. Terima kasih, dua hal pertanyaan ini yang saya sampaikan mudah-mudahan nanti bisa dijawab dengan konkret. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Musthofa.

Berikutnya Fraksi Partai Golkar.

F – PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Terima kasih Pak Dolfie.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat Pak Dwi beserta seluruh jajaran fraksi balkon yang telah hadir pada hari ini.

Semoga kerjanya tetap selesai ya Pak ya hari ini, sudah diingatkan tadi sama Pak Ketua indikator kinerjanya tetap terpenuhi.

Mungkin tadi sudah disampaikan senada dengan Pak Musthofa sebenarnya apa yang ingin kita tanyakan terkait dengan pengendalian inflasi dan bagaimana nanti Pak Dwi ketika terpilih menjadi Anggota Dewan Gubernur bisa mendorong supaya ada peningkatan peran KPWDN Bank Indonesia untuk bisa bekerja optimal dalam mendukung target pembangunan daerah.

Dan yang kedua, di yang Undang-Undang PPSK yang kemarin kita bahas bersama Pak, di situ kan peranan Bank Indonesia kita tambahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak selama ini mengelola kantor regional, kira-kira bagaimana hal tersebut bisa diterjemahkan terhadap peranan Bank

Indonesia di daerah dan upaya penguatan seperti apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia di daerah untuk menerjemahkan apa yang kita telah tuang di Undang-Undang PPSK?

Dan yang ketiga, saat ini kita masih dihadapkan dengan disparitas antar wilayah dan karena itu apabila Bapak nanti terpilih menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia, kira-kira terobosan apa yang bisa Bapak dorong dalam Dewan Gubernur supaya kita bisa mereduksi jurang ketimpangan tersebut, apalagi pasca pandemi Covid-19 ini terjadi banyak permasalahan sosial dikarenakan ketimpangan yang semakin menjurang.

Dan yang terakhir, seperti apa Pak Dwi memandang independensi Bank Indonesia pada saat ini? Tadi sudah ada rekan-rekan yang mempertanyakan hal yang sama ke Bu Fili, jadi kita juga ingin dengar pandangan Bapak terkait dengan independensi dan sekiranya mungkin ada yang menurut Bapak harus diperbaiki apabila memang ada dari kenyataan yang ada sekarang. Mungkin itu dari kita Pak Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Puteri.

Berikutnya Fraksi Partai Gerindra siapa? Pak Hergun.

F – P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan, Kawan-kawan Komisi XI yang saya hormati, Pak Dwi Pranoto, terima kasih atas paparan yang disampaikan.

Di sini Pak Dwi Pranoto menyajikan terkait makalah “Sinergi Menuju Indonesia Maju”. Kalau saya lihat Pak Dwi, kalau kita melihat berdasarkan kebijakan moneternya pada halaman 28 yang Bapak sampaikan, Pak Dwi akan melaksanakan strategi terkait inovasi instrumen operasi moneter untuk stabilisasi nilai tukar. Kita pahami bersama saat ini memasuki era tingginya suku bunga kebijakan di bank sentral. Bank sentral sudah menetapkan suku bunga kebijakan 5,75%, tentunya dampak kenaikan suku bunga ini akan membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan ini akan menghambat pengeluaran tentunya juga menghambat investasi dan orang akan berpikir menyimpan lebih baik menyimpan uang di bank karena risikonya lebih murah, lebih rendah. Hal ini tentunya akan menyebabkan pasar saham mungkin turun, tingginya harga komoditas kemarin juga membantu Bank Indonesia di mana untuk menjaga ruang moneter yang sesuai pastinya seperti itu, tapi kan dampak kebijakan tingginya harga komoditas ini lambat laun dalam waktu dekat tentunya akan kembali ke normal kembali, kenapa? Karena tren penurunan harga-harga komoditas dan perlemahan ekonomi secara global begitu loh Pak Dwi.

Saya ingin mengetahui apa yang akan Pak Dwi lakukan kalau seandainya terpilih menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia di bidang moneter, antisipasi kebijakan apa saja yang menurut calon Deputy Gubernur Bank Indonesia ini dalam mengantisipasi berbaliknya surplus perdagangan dan bagaimana upaya BI dalam menurunkan harga-harga di luar negeri untuk penguatan stabilitas ini tentunya dalam waktu dekat?

Saya juga ingin mengetahui bagaimana *sih* kebijakan moneter saat ini yang dikaitkan dengan imbal hasil obligasi pemerintah dan *treasury bond*-nya begitu Pak Dwi. Apakah cukup berdampak untuk mengantisipasi arus modal keluar dan gejolak rupiah?

Pak Dwi, dalam makalah halaman 23 saya melihat Bapak memaparkan terkait ketujuh strategi yang Bapak sebut sinergi dengan filosofi bahwa seluruh strategi yang dilakukan menggambarkan bauran kebijakan dan sinergi lintas kementerian ataupun lembaga. Hal ini tentunya dapat dilakukan jika berdampak besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, agar konsep dan gagasan yang bagus ini tidak hanya ada di dalam makalah Pak Dwi begitu. Saya ingin tahu juga Pak Dwi apakah Pak Dwi dalam menyusun tujuh strategi ini sudah menghitung proyeksi terhadap perekonomian khususnya terkait pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor karena Bapak di sini melibatkan kementerian dan lembaga, sehingga kita dapat mengetahui ternyata gagasan ini sudah dikalkulasikan begitu dan dampaknya memberi keyakinan kepada kami di Komisi XI bahwa calon deputy gubernur ini memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan tujuh program ini begitu Pak Dwi.

Dan kami juga ingin tahu Pak Dwi bagaimana kalau seandainya Bapak menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam memperjuangkan tujuh agenda saat ini, apakah dapat terwujud untuk mewujudkan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi?

Pak Dwi, kalau kita melihat stabilitas makro ekonomi dan kondisi terkini, tentunya diperlukan langkah-langkah diversifikasi terkait masalah pertumbuhan ekonomi yang mendukung terkait masalah pengelolaan moneter dan makroprudensial sebagai bantalan menuju eksis *strategy policy* di tahun 2023. Kami ingin tahu Pak Dwi, bagaimana *stand* kebijakan Pak Dwi kalau terpilih menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia yang akan diwujudkan dalam waktu dekat pasca dilantik sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk mendorong diversifikasi ataupun motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pemulihan ekonomi melalui *progrowth* dan *prostability* yang akan diwujudkan di tahun 2023 ini, begitu Pak Dwi.

Terkait masalah *slide* 21 yang Pak Dwi sampaikan, di sini Pak Dwi memaparkan terkait masalah inovasi instrumen operasi moneter stabilisasi nilai tukar dalam bentuk *term* deposit valas devisa hasil ekspor atau DHE. Kita kan sama-sama ketahui Pak Dwi, PBI sudah dikeluarkan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dalam memperkuat kestabilan nilai tukar rupiah dengan menahan DHE SDA khususnya ya sumber daya alam untuk ditempatkan pada pasar keuangan domestik secara berkesinambungan. Ini

kan sudah ada PBI-nya. Saya ingin tahu seberapa efektif sih kebijakan ini begitu loh Pak Dwi untuk mendorong para importir memasukkan DHE ke dalam rekening perbankan domestik dan di sisi lain kita ketahui juga negara rendah lain juga memberikan penawaran bunga yang cukup tinggi begitu Pak Dwi.

Satu lagi mungkin Pak Dwi, di sini disampaikan di dalam tujuh ringkasan tujuh strategi ini dalam ringkasan eksekutif, di sini disampaikan terkait inklusi ekonomi melalui pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, di mana salah satunya berbicara tentang ekonomi syariah Pak Dwi. Salah satu misi Bank Indonesia kita ketahui adalah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah kita ketahui bersama itu. Kalau berbicara ekonomi syariah, kita ini selalu disajikan data-data tentang potensi yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan sekaligus juga sebagai penduduk muslim terbesar di dunia dan selalu diulang-ulang dalam setiap forum, termasuk mungkin dalam program ini Pak Dwi. Namun, faktanya pangsa pasar untuk *market share* syariah ini, ini hanya mencapai 7% begitu. Adapun literasi keuangan syariah hanya mencapai kurang lebih 9%.

Kami ingin melihat langkah konkret yang akan Bapak bawa terkait masalah mendorong kemajuan perbankan syariah ini, terobosan apa yang akan dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di tahun 2023 dan kami ingin tahu berapa persen *sih* target pangsa pasar ini? Saya pikir mungkin cukup sekian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hergun, ada delapan pertanyaan ya. Mungkin sudah cukup mewakili kali? Belum?

Berikutnya Nasdem, Pak Fauzi Amro.

F – P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Kalau banyak pertanyaan itu biasanya *enggak* milih Pak. Catatannya itu Pak. Terima kasih Pak Hergun.

Pak Dolfie, Kawan-kawan fraksi seluruh fraksi, baik yang ada wajah-wajah baru juga ada sahabat dan Deb dan Ibu Novi. Mudah-mudahan betah di Komisi XI, jangan sampai di-BKO saja Pak Hergun kalau bisa betah Bu Novi di XI ini ya Bu Novi ya? Biar Pak Eriko juga nyaman di XI ini, Yang kedua, selamat ulang tahun kepada Om Inton, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, terpilih lagi periode ke depan, Pak Dwi yang saya hormati dan saya banggakan, Dwi Pranoto.

Bapak hari ini dilakukan *fit and proper* di Komisi XI, walaupun di FGD kemarin sudah pernah *fit and proper*, *tapi* hari ini secara tidak langsung Bapak

diuji baik pertanyaannya kayak Pak Hergun maupun pertanyaan kayak Ibu Puteri tadi Pak.

Pertama, Pak Dwi selamat datang di *fit and proper* Komisi XI, kami melihat dari dua buku yang disampaikan Pak Dwi ini, Pak Dwi ini serius mencalonkan diri sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia. Kami berharap keseriusan Pak Dwi ini juga menjadi keseriusan bagi Komisi XI untuk memilih Pak Dwi.

Yang pertama, saya melihat ringkasan saja Pak *summary executive* dari yang disampaikan oleh Pak Dwi ini dari "Sinergi Menuju Indonesia Maju". Ada beberapa hal yang *pengen* saya sampaikan Pak tentang stabilitas harga melalui upaya pengendalian inflasi secara terukur. *Nah*, saya melihat selama ini Pak KPwD yang ada di wilayah-wilayah itu dia tidak punya otoritas untuk mengambil kebijakan. Semua kebijakan itu berasal dari bank sentral. Mereka hanya pelaksana, termasuk kebijakan dan anggarannya pun disentralkan semua dan ini tidak ada keluwesan daripada KPw untuk melakukan atau mengambil inisiatif atau mengambil keputusan. *Nah*, ini yang terjadi selama ini Pak Dwi.

Nah, apa terobosan Pak Dwi karena masing-masing daerah ini kan ragam inflasinya berbeda-beda Pak, teknik penanganannya pun berbeda-beda. *Nah*, saya belum melihat selama ini karena mungkin Pak Dwi sangat ahli pada bidangnya ini, apa terobosan Pak Dwi dalam hal kebijakan maupun dalam hal anggaran sehingga KPw yang ada di wilayah-wilayah itu tidak hanya pelengkap bagi Pemda Pak, tapi dia punya otoritas untuk mengambil keputusan.

Yang kedua Pak, beberapa eskalasi digitalisasi dengan sistem pembayaran yang mungkin lewat QRIS, BI Fast dan seterusnya itu. *Nah*, saya melihat Pak, sistem pembayaran ini belum masif dilakukan oleh Bank Indonesia ke kelompok-kelompok usaha seperti UMKM Pak. *Nah*, sehingga kami menyarankan kalau Pak Dwi terpilih nanti, khususnya *payment* sistem pembayaran ini harus melibatkan kelompok-kelompok atau UMKM sebagai pelaku usaha karena jangan sampai digitalisasi ini menjauhkan UMKM dari bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dan yang terakhir, kami melihat bahwa dari ringkasan ini dari tujuh ini mudah-mudahan ringkasan *summary executive* ini tentang bauran kebijakan, Pak Dwi sebagai calon Deputy Gubernur Bank Indonesia bisa diimplementasikan ketika Pak Dwi menjadi Gubernur Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Kira-kira tiga poin itu Pak, saya terlalu banyak kayak Pak Hergun nantinya. Terima kasih Pak.

Wabillaahittaufik walhidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fauzi Amro, *to the point*.

Fraksi PKB? Sedang sosialisasi? Ya. Fraksi Partai Demokrat siapa? Pak Didi? Ya silakan Pak Didi.

F – PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M.):

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi XI,
Yang terhormat Bapak Dwi Pranoto ya.

Terima kasih Pak sudah hadir pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam paparan yang Bapak Dwi Pranoto sampaikan, kami ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana maksud dari strategi pengendalian inflasi yang bersifat *quick wins* dan bagaimana hal tersebut bisa diterapkan dalam perekonomian negara Indonesia ini?

Dua, Pak Dwi juga menyampaikan mengenai sinergi erat dan intensif antar pemangku kebijakan pusat dan daerah. Menurut Pak Dwi sinergi seperti apa yang ideal untuk diterapkan dengan didukung perangkat regulasi yang ada yang sekiranya berdampak untuk pertumbuhan ekonomi dan masyarakat?

Mungkin sementara dua itu dulu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Didi.

Berikutnya Fraksi PKS, Pak Hidayatullah, silakan Pak.

F – PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Pimpinan Komisi XI, beserta Rekan-rekan Komisi XI,
Yang kami hormati Pak Dwi, bakal calon Dewan Deputi Dewan Gubernur.

Kami hanya satu hal saja yang ingin dipertanyakan, sedikit prolognya, presentasi Pak Dwi “Sinergi Menuju Indonesia Maju”. Kita sepakat kita setuju, cuma maju seperti apa? Maju diukur dengan pertumbuhan, apakah itu yang dimaksudkan ekonomi tumbuh seperti yang ada saat ini, tapi orang miskin bertambah, tentu kita menginginkan majunya Indonesia itu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan memang mutlak diperlukan sinergi dan ketika

sinergi dilakukan, para pihak *stakeholders* ini harus mempunyai *legal standing* yang sama, BI dengan independensinya tentu menjalankan kebijakan-kebijakannya, tapi kalau ada salah satu para pihak yang mendominasi nanti akhirnya sinerginya itu tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat.

Kaitannya dengan tugas pokok fungsi dari BI itu terkait inflasi sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan, karena pertumbuhan itu kan akan dikoreksi oleh inflasi dan pada akhirnya inflasi itu akan menjadi jebakan buat kelas miskin setelah mereka bersusah payah meningkatkan kesejahteraannya tapi semuanya dipotong oleh inflasi itu, sehingga mereka terus terjebak di kemiskinan itu, bahkan di negara kita orang miskinnya terus bertambah. Sementara di sisi lain inflasi itu juga menjebak, menjebak para pengusaha, pengusaha besar tidak bisa keluar dari situ, dia akan terus menjadi pengusaha dan semakin besar karena ujung dari kenaikan harga itu akan dinikmati oleh produsen akhir pengusaha-pengusaha besar itu. Akhirnya kalau inflasi tidak terjaga tidak menuju ke arah nol, maka rakyat miskin akan mensubsidi orang-orang kaya. Ini yang terjadi di kita. Sementara yang di tengah-tengah UMKM itu menjadi *bumper*-nya mereka juga akan terjebak di situ.

Nah, kita mau sinerginya ini sinergi yang seimbang. Misalnya sinergi antara BI dengan Pemerintah terkait situasi kondisi pemerintah misalnya kesulitan dana. Lalu BI melanggar pakemnya, membeli SBN di Pasar Perdana. Tadi sudah terungkap angkanya sudah 1000 triliun lebih yang lalu membeli Surat Berharga Negara di Pasar Perdana. Bagaimana pandangan Bapak seperti ini untuk menjaga BI yang kuat untuk Indonesia yang maju itu?

Latar belakang kenapa terjadi *burden sharing* itu kan dengan perkiraan bahwa APBN tidak akan terpenuhi dari sisi pendapatan, maka pemerintah jual surat utang, tapi kan faktanya tahun 2022 misalnya kita surplus sampai 200 triliun. Bagaimana pandangan BI, ada membeli pasak membeli Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dengan perkiraan bahwa pemerintah tidak mampu mencukupi pendapatannya, tapi ternyata pendapatannya surplus, apakah tidak ada mekanisme misalnya uang yang surplus itu dikembalikan sehingga *burden sharing* yang Bapak keluarkan itu tidak sebesar yang ada saat ini dan itu tentu akan memperkuat sisi keuangan BI. *Burden sharing*-nya 1.100 misalnya, karena ada 200 surplus dikembalikan, lalu sisanya cuma 900 itu kan menguatkan. Apakah pemikiran-pemikiran seperti itu untuk menguatkan BI itu menurut Bapak seperti seperti apa?

Sekali lagi inflasi itu sangat memukul Pak. Jadi 26 juta itu yang orang miskin kita itu standarnya yang 504 ribu Pak perbulan, dapatnya 26 juta. Bayangkan kalau dinaikkan standar kemiskinan itu jadi 1 juta, mungkin orang miskin kita sudah 60-70 juta. Kita menganggap miskin itu orang yang pendapatannya lebih kurang di 17 ribu, padahal 50 ribu pun *nggak* cukup pendapatan sehari. Jadi di sini peran BI terkait inflasi ini sangat sangat penting, jangan mereka sudah miskin bekerja dengan sungguh-sungguh, meningkat pendapatannya, lalu pendapatannya dipotong oleh inflasi. Rata-rata inflasi misalnya 3 plus minus itu plus minus 1 itu kan rata-rata Pak, yang

paling tinggi itu inflasinya kan di sektor makanan dan justru itulah yang paling menghantam orang miskin itu karena mereka semua belanjanya di makanan, kalau di mobil, di sepeda motor, di apa itu menengah ke atas. *Nah*, ini yang bagi kami perlu perhatian, bagaimana pandangan Bapak?

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hidayatullah.

Berikutnya Fraksi PAN, silakan Pak Hafisz, Pak Primus oh silakan.

F – PAN (PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak-Ibu yang saya hormati,
Pak Dwi, selamat datang di Komisi XI.

Saya satu saja Pak, cuma agak dalam ini Pak, maksudnya saya ingin berbicara terkait pertumbuhan ekonomi kita yang di 5,31% itu tahun 2022. Pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan ekonomi kita itu berkualitas atau tidak? *Nah*, ini yang perlu kita dalam.

Kalau kita lihat bahwa ada empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB kita, pertama adalah perindustrian sebesar 18%, terus juga pertambangan 12%, pertanian 12,5%, dan perdagangan 12,8%. Ini data saya ambil dari BPS, jadi valid ini, tidak ada keraguan.

Saya akan mendalami dua saja yaitu industri dan pertanian karena ini berhubungan sama UMKM kita Pak. *Nah*, yang menarik adalah ternyata pertanian itu memberikan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan sebesar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi menurut survei Bank Indonesia tahun 2022 yang dirilis oleh Bank Indonesia sendiri itu bahwa kredit yang diberikan kepada UMKM kita khususnya pertanian itu menurun di Kuartal Ketiga itu sebesar 74%, maaf saldo bersih tertimbang turun dari porsinya yaitu di kuartal ketiga itu sebesar 74%, di kuartal keempat 67%. *Nah*, kreditnya itu dari 54% terjun bebas ke 18%, *nah* ini kenapa? Apakah pertama itu karena suku bunga yang dinaikkan atau yang kedua Pak seperti yang tadi kawan-kawan katakan bahwa Bank Indonesia ini lebih tertarik untuk membeli surat berharga daripada dikucurkan kepada masyarakat kecil yang bawah? Kalau ini sampai terjadi Pak, semoga itu tidak benar.

Memang jangka pendeknya Bank Indonesia itu mencari aman karena tidak akan macet kreditnya berhadapan dengan rakyat langsung, tapi ini adalah fundamental ekonomi kita di garda terdepan. Kalau mereka tidak

dilatih, tidak diberikan stimulus, 10 tahun ini berantakan Pak. *Nah*, menurut anda bagaimana?

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Primus.

Ibu Wartiah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F – PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

*Bismillaahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi XI beserta Rekan-rekan Anggota Komisi XI,
Yang saya hormati Bapak Dwi Pranoto, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Saya memulai dengan apresiasi saya dulu melalui riwayat penugasan Bapak ya. Saya melihat di sini Bapak mendapat penghargaan di tahun 2021 sebagai *best chain leader* Bank Indonesia, ini luar biasa. Kemudian 2006 peserta terbaik Sekolah Pemimpin Bank Indonesia.

Selanjutnya di sini juga saya melihat pengalaman spesifik dalam riwayat Bapak adalah mengakselerasi peningkatan kinerja 46 kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mengimplementasikan bauran kebijakan Bank Indonesia di daerah baik dalam pengendalian inflasi, termasuk melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan maupun dalam pemulihan ekonomi melalui penguatan kualitas *assessment* dan rekomendasi ekonomi dan keuangan daerah, pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, perluasan ekonomi dan keuangan digital di daerah peserta penguatan. Sebentar, gangguan teknis.

Saya langsung Pak ya, langsung kepada dalam kaitannya dengan pengalaman spesifik Bapak dikaitkan dengan sinergi menuju Indonesia maju seperti apa? Mohon penjelasan.

Kemudian selanjutnya suku bunga global diperkirakan akan terus naik dan mencapai titik tertinggi di 2023, apakah situasi kenaikan suku bunga dapat memperlebar NIM perbankan sehingga efisiensi perbankan yang diharapkan tidak berjalan sesuai harapan, mengingat Indonesia adalah negara dengan *nett interest margin* yang tertinggi di ASEAN, bagaimana menurut Bapak?

Kemudian selanjutnya bagaimana efek naiknya suku bunga dan langkah mitigasi terhadap pemulihan sektor riil khususnya UKM dan industri padat karya? Kami mohon penjelasan selaku calon Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Kemudian seberapa optimis Bapak terkait program hilirisasi pemerintah dalam rangka penguatan nilai tukar rupiah dan peningkatan devisa hasil ekspor dari sisi kebijakan moneter untuk memastikan bahwa hilirisasi dapat berjalan optimal, apakah diperlukan aturan porsi kredit perbankan kepada sektor yang terkait hilirisasi? Bagaimana menurut Bapak selaku calon Deputy Gubernur Bank Indonesia?

Dan terakhir, tema laporan tahunan BI adalah sinergi dan inovasi memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju, bisa dirinci bentuk inovasi kebijakan moneter apa yang ingin dilakukan pasca pandemi? Sebelumnya ada kebijakan *out of the box* terkait *burden sharing*, mohon penjelasan Bapak Dwi Pranoto selaku calon Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam.

Masih ada Bapak-Ibu? Pak Eriko jadi Pak? Ya, Pak Eriko silakan.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.):

Baik, terima kasih Pak Dolfie.

Pimpinan dan juga seluruh Rekan-rekan Anggota Komisi XI yang saya banggakan,
Pak Dwi Pranoto dan pendukungnya mana ini pendukungnya? Kenapa enggak ada? Ayo dong! Mana belum kelihatan ini, ya.

Ya Pak Dwi Pranoto ini dasinya saja merah kan seperti Bu Anis pakai juga warnanya merah. Pak Dwi, tadi saya juga di Ibu Fili mau bertanya hal ini sebenarnya. Sebenarnya saya melihat siapapun di antara Bu Fili dan Pak Dwi memang Anda ini adalah orang-orang terbaik dari yang terbaik. Sekali lagi berikan *applause* untuk Pak Dwi Pranoto dan Bu Fili, karena saya tahu persis Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi XI bagaimana prestasi mereka di SESPI BI-pun mereka satu angkatan betul ya Pak? Dan bagaimana mereka bergantian menjadi yang terbaik.

Jadi menurut pendapat saya subjektif mungkin bahwa yang diajukan ini memang yang terbaik dari yang terbaik dan itu memberikan harapan bagi semua yang bekerja di bank Indonesia bahwa siapa yang bekerja baik pasti

akan mendapatkan kesempatan yang baik pula. Jadi sekali lagi tentu kami sangat mengapresiasi dari Pak Dwi maupun Bu Fili maupun saudara-saudara kami yang ada di Bank Indonesia.

Saya akan bertanya berbeda dengan yang lain karena menurut saya kalau dari segi kemampuan tidak perlu diragukan, menurut saya ya, tentu kita boleh berbeda dalam hal ini. Jadi saya lebih kepada sebenarnya masa depan Bank Indonesia ini sendiri Pak Dwi, saya ingin bertanya, saya melihat bagaimana proses untuk menerima di Bank Indonesia itu demikian lapis berlapisnya, bahkan setahu saya lebih dari 100.000 orang yang melamar, yang diterima cuma 143, 33 orang dari dalam.

Nah Pak Dwi, saya ingin tanya kepada Anda, sebenarnya sama Bu Fili pun tadi saya ingin tanyakan, bagaimana Anda mau bilamana diberikan kesempatan menjadi Deputy Gubernur mengembangkan karir mereka? Adakah orang yang tahan seperti Pak Dwi maupun Bu Fili 30 sekian tahun di Bank Indonesia, menapak setapak demi setapak, *it's not easy, enggak* ada orang muda sekarang atau yang akan datang generasi Z yang mau seperti itu.

Nah, saya mau tanya sekali lagi bagaimana cara Bapak nanti kalau diberikan kesempatan menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk merespon karir mereka ini? Karena kan orang-orang muda tidak harus juga menjadi deputy gubernur, tidak harus juga menjadi kepala departemen, tidak harus menjadi asgub, tapi bahwa Bank Indonesia bisa menghasilkan SDM yang terbaik. Kalau zaman dulu Citibank, sekarang mungkin salah satu Bank Mandiri. *Nah*, kenapa Bank Indonesia tidak bisa? Karena yang terbaik dari yang terbaik yang diterima. *Nah*, bagaimana Pak? Karena saya harus jujur, dari segi pendapatan, dari segi peningkatan karir, lambat Pak. Mungkin bagi orang-orang zaman Bapak, zaman saya maupun juga yang Ibu-Bapak yang saya hormati yang ada di balkon, bisa menerima ini karena memang itu yang harus dijalani dengan ucapan syukur tetapi generasi muda belum tentu Pak. *Nah*, bagaimana cara Bapak membuat perubahan dalam hal ini mentransformasikan Bank Indonesia?

Yang kedua, kita tahu sama-sama, sekarang tidak ada jaminan lagi, ini standar utama bahwa uang itu di-*cover* dengan namanya emas, betul Pak Dwi? Coba dijawab dulu Pak Dwi? Betul Pak Dwi? Tidak ada, mau dolar Amerika, dolar apapun, termasuk rupiah tidak dijamin lagi sama. Jadi apa yang menjamin Pak? Namanya *trust*, kepercayaan. Lah bagaimana kalau nanti ada sistem yang sangat dipercaya yang bisa menggantikan peran dari bank sentral ini? Ini sudah mulai ada tanda-tandanya yang namanya *crypto currency*, sudah beberapa bank sentral negara yang mengakomodir ini karena merasa tidak mungkin lagi ada harapan dengan kapitalisme yang ada di dunia ini, oligarki dan segala hal. *Nah*, ini bagaimana sikap Bank Indonesia menyikapi hal ini Pak yang konkret kami mohon Pak, singkat, konkret.

Yang ketiga, ini pertanyaan dari teman-teman saya suka tiga Pak, tadi Bapak jarang menyebutkan tiga. *Nah*, tadi Bu Fili sering sebutkan tiga, cuma saya *enggak* kesempatan untuk nanya. *Nah*, nanti mudah-mudahan jawaban

Bapak juga tiga juga supaya sesuai dengan angka tiga kami Pak seperti itu. Teristimewa untuk yang di atas kan begitu kan, ini kan pasti Dapil-dapil kami juga ini kan begitu. Terima kasih ya yang di atas Ibu-Bapak.

Nah, Pak bagaimana dana hasil sisa ekspor? Bagaimana cara bapak untuk menarik itu ke sini? Ini titipan dari Nyoman juga ini pertanyaannya, bagaimana Pak? Kalau itu terjadi Pak, *ndak* ada masalah. Bapak mau intervensi setiap waktu untuk menjaga apa, menjaga apa ini, bukan likuiditas lah, menjaga apa namanya *exchange rate*-nya ini bisa stabil, *enggak* ada masalah dan kita tidak akan berbicara lagi cadangan devisa kita naik turun-naik turun. Presiden sudah menyampaikan bahwa kita akan menghilirisasi dan nilai tambahnya itu bisa 30, 60, 100 kali lipat, tapi kalau *enggak* masuk untuk apa Pak? Bagaimana cara Bapak Pak? Ini penting sekali.

Jadi tiga hal itu barangkali melalui pimpinan di sini, kami minta Bapak menjawab secara singkat, padat, dan lugas karena *enggak* bisa juga jawab tujuh hari Pak, ini bukan rapat kerja. Kalau boleh tujuh hari saya *enggak* masalah Pak, tapi kami harus mendapatkan segera dan menurut saya ini inti daripada kepemimpinan Pak, kalau sistem yang Bapak tuliskan tadi yang Ibu Fili tuliskan sudah saya *ndak* meragukan karena Bapak sudah apa *khatam* Pak di sini Pak, sudah hapal Pak A ke Z-nya sudah hapal, tapi tiga ini Bapak bisa tidak memberikan solusinya? Yang konkret Pak, jangan mudah-mudahan, itu yang kami harapkan di sini.

Sekali lagi terima kasih Pak Dwi Pranoto, sukses Pak, Bapak sudah tertinggi Pak karena kenapa, ini hanya sudah tinggal proses politik. Kalau dari segi jabatan kalau di militer namanya kolonel Pak, kalau di BI kan asisten gubernur, *ndak* ada lagi, pensiun pun sudah paling tinggi betul ya Pak Dwi Pranoto kan sudah tidak ada lagi, ini yang tertinggi. Jadi sekali lagi Bapak harus bangga, Bapak dapat mengikuti proses *fit and proper* ini, kami semua di sini belum tentu bisa mengikuti *fit and proper* di sini, serius Pak. *Nah*, kalau BPK ada harapan untuk Profesor Hendrawan, saya pasti dukung Pak.

Sekali lagi terima kasih Pak Dwi Pranoto, sukses untuk Bapak, sukses untuk saudara-saudaraku yang ada di atas, berikan *applause* sekali lagi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merdeka!

Jelas Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Eriko.

Cukup ya, ada 30 pertanyaan anggota, lebih banyak daripada yang pertama tadi *nih*. 30 pertanyaan yang harus direspons oleh Pak Dwi. Bapak bisa merespons per topik Pak, tadi banyak yang menanyakan soal inflasi. Inflasi dikaitkan dengan kapasitas KPW untuk melakukan intervensi.

Kemudian inflasi dikaitkan dengan sensitifitas kemiskinan. Kemudian ada juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tadi mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi kita kualitas misalnya dilihat dari sektor-sektor tertentu seperti pertanian tadi.

Kemudian pertanyaan juga tadi ada terkait dengan independensi Bank Indonesia. Kemudian bagaimana mengelola devisa hasil ekspor untuk memperkuat kebijakan BI dalam melakukan stabilitas nilai tukar. Kemudian juga mengenai ekonomi syariah dan keuangan syariah yang selalu dikatakan potensialnya besar tapi aktualisasinya selalu kecil, ini bagaimana terobosan ke depan?

Kemudian ada juga terkait dengan kebijakan moneter yang dikaitkan dengan SBN. Kemudian berikutnya lagi soal suku bunga kredit dan kebijakan BI, kemudian pengembangan karir SDM di Bank Indonesia, dan *crypto*. Jadi bisa pertopik Pak supaya karena banyak yang sama pertanyaan dari yang terhormat Bapak-Ibu Anggota. Silakan Pak Dwi waktunya 25 menit.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (Ir. DWI PRANOTO, MBM.):

Terima kasih Pak Ketua.

Sebelum saya menjawab saya ingin memberikan apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sifatnya ada kalau tiga poin tepatnya pertanyaan yang pertama sifatnya mempertanyakan untuk memperoleh klarifikasi, yang kedua mencari solusi, dan yang ketiga adalah saran, nasehat atau masukan buat kami semua.

Terima kasih kepada Pak Musthofa yang sudah mengajukan dari PDIP, terima kasih juga Ibu Puteri dari Golkar. Terima kasih juga dari Pak Heri Gunawan dari Gerindra dan juga dari Pak Fauzi Amro dari Nasdem, Pak Didi Irawadi dari Demokrat, Pak Hidayatullah dari PKS, Pak Primus dari PAN dan juga Bu Wartiah dari P3 dan Pak Eriko yang tanya selalu *intriguing* dari PDIP.

Untuk inflasi Bapak Ketua, jadi dapat kami sampaikan tadi kan ingin yang konkret ya memang betul sekali Pak Hidayatullah ya jadi inflasi ini khususnya pangan paling tidak sudah kontribusi setelah 20%. Kalau untuk yang menengah bawah atau yang paling bawah bahkan 60% karena isi perut ya kira-kira ya. Jadi inflasi pangan atau *volatile food* ini harus kita atasi duluan memang.

Kemarin kalau sebagai contoh pada Juli 2022, *volatile food* itu 11,47%. Nah, pada Desember 2022 sudah 5,61%. Juli, pada bulan Juli itulah kita *launching* Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan, jadi GNPIIP. Ada tujuh program di sana kaitan dengan OPT atau pasar murah, kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai karena cabai waktu itu penyumbang terbesar dari inflasi kita, replikasi model bisnis,

Alsintan alat pertanian dan juga Saprotan sarana produksi, digitalisasi data dan informasi, maupun koordinasi dan komunikasi.

Jadi kalau kita lihat Pak itu luar biasa. Jadi tadinya pasar murah hanya berapa titik jadi 2.600-an titik bisa terjadi di kerja sama antar daerah saya kira ini penting juga kerja sama antardaerah, daerah surplus defisit terakselerasi dengan cepat, sekarang ini sudah sekitar 63. Bayangkan hanya biasanya 63 itu bisa 2 tahun untuk 3 tahun, ini dalam waktu 6 bulan saja sudah 63. Subsidi ongkos angkut juga kencang di sana kentang, cabai, replikasi bisnis model juga Alsintan, digitalisasi dan seterusnya.

Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi ke depannya ini? Ya tadi pertanyaan Pak Fauzi Amro juga ya. Jadi di mana ini untuk kontribusi kita? Jadi di mana ini peran BI ya Pak Musthofa ya jangan hanya rapat-rapat saja ya.

Nah, kami kemarin itu memang masih fokus kebanyakan di operasi pasar ya dengan konteks kita membangun di sana dan juga membuat *cluster* ya jadi *cluster* lebih ke sana. Nanti ke depannya Pak nanti untuk melakukan dengan PSBI kami, jadi sudah nanti sampai *touch* juga untuk Alsintan dan Saprodinya Pak. Untuk *cluster*-nya kita akan perluas, jadi *room*-nya sudah ada Pak, dana sudah dialokasikan. Ya jadi betul Pak Musthofa, jadi bukan hanya rapat-rapat saja, nanti kita sudah banyak nanti konkret di sana.

Waktu FGD kami sudah sampaikan ya Pak Ketua izin untuk Sumatera memang fokusnya diversifikasi pangan dan inovasi teknologi, kenapa, karena memang di situ persoalan-persoalan pangan perlu kita *diversified*.

Untuk Kalimantan inovasi budidaya pertanian, katanya orang-orang Kalimantan banyak orang kaya Pak, jadi banyak beras dari Sulsel mau ke Jakarta ditarik ke sana, jadi keambil ke sana. Jawa digitalisasi dan hilirisasi pertanian kan saya menjawab digitalisasi pertanyaan Pak Musthofa juga, Sulampua kelancaran distribusi, Bali Nusa ada konektivitas dan digitalisasi ya ini yang bagian Pak Agung Rai juga kan sering ya untuk Bali itu pusat konektivitas yang menjadi penting di sana.

Nah, memang pertanyaannya adalah bagaimana memutus rantai ini ya. Jadi betul Pak kalau ini sekarang untuk pangan kita dari produsen ke konsumen bisa sampai tujuh apa sembilan rantai itu paling banyak yang menikmati adalah pengepul. Salah satu solusi yang waktu itu kita usulkan dan kita rekomendasikan dan juga sudah dilaksanakan bersama kementerian itu adalah dengan *e-commerce* Pak. Jadi memotong dari produksi konsumen kita potong di sana, jadi melalui *e-commerce* di sana di tengah-tengah. Jadi bisa dari tujuh sampai sembilan *layer* bisa jadi empat atau tiga *layer*. Ini petani *enggak* sengsara, jadi tetap bahagia tadi Pak Hidayatullah karena NTP-nya tetap naik, konsumen bahagia karena harganya turun. Jadi petani senang, konsumen juga senang karena kita perpendek rantai pasokannya.

Terus yang menarik juga adalah di mana ini persoalan-persoalan untuk yang kita pecahkan untuk distribusi ini. *Nah*, memang kita tiap daerah tidak

sama lagi. Jadi kemarin ... (suara tidak jelas) cabai serentak ya tanaman cabai jadi persoalan, nanti untuk ini kita beda-bedakan setiap wilayah tentunya sesuai dengan komoditi penyumbang inflasi terbesarnya, nanti kita bisa fokuskan di sana, jadi bisa lebih luas. Di Sulampua mungkin perikanannya, di tempat lain mungkin komoditi apa, nanti tentunya keterlibatan Bapak-Ibu Anggota Komisi XI sangat kami harapkan di sana.

Untuk yang Bu Puteri, untuk pengendalian investasi tadi saya kira sudah banyak kita jawab ya. Untuk Undang-Undang P2SK penguatan apa yang berkelanjutan, memang di sini menjadi kata kunci ya. Kalau kita bicara Indonesia maju, kalau kita bicara Indonesia maju kan harus intinya adalah semua elemen bangsa ini harus maju membantu Indonesia maju, tidak ada Bank Indonesia berdiri sendiri, tidak ada kementerian lain berdiri sendiri, tidak ada lembaga-lembaga lain mau berdiri sendiri, namanya Indonesia maju itu. Jadi kita harus yakinkan itu bahwa melihat Indonesia maju seperti itu ya. Jadi kita semua bersinergi.

Tadi Bu Puteri juga mengangkat disparitas antar wilayah. Betul Bu, jadi memang *growth* tadi yang kalau kita lihat *growth* untuk setiap daerah kelihatannya mirip-mirip ya untuk *growth*-nya yaitu sudah mulai merata, tapi merata secara spasial. Jadi wilayah secara wilayah dia merata, tapi kalau kita bedah misalnya begini ya, Sumatera 4,69%; Kalimantan 4,94%; Sulampua 7,49%; Jawa 5,31%; Bali Nusa 5,08%, kan kelihatannya mirip-mirip ya sudah mulai merata, tapi kalau kita bedah Sumatera itu *range*-nya 4,21 sampai 5,29% yang terendah tertinggi. Yang paling parah memang Sulampua *range*-nya dari 2,3% sampai 22,9% *growth*-nya. Jadi memang masih terjadi disparitas *within*, *within* wilayah itu. Kalimantan Timur sedikit-sedikit 4,48 sampai 6,45; Jawa 5,03-5,45; Bali Nusa 4,84 sampai 6,95. Jadi *more or less enggak* terlalu beda jauh. Jadi disparitas memang menjadi PR *nih* tapi tentunya kita akan bangun sama-sama.

Mengenai independensi, saya kira nanti otomatis sudah kita jawab Bu, Bu Puteri ya. Tadi ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana *burden* atau keterlibatan kita di *burden sharing* kalau paling tidak kita mengatakan bahwa kembali ya sinergi nasional kita sudah *success story* Covid sudah kita lakukan, saya kira nanti seperti nanti program hilirisasi. Jadi kita sama-sama untuk ngerubutin ini, jadi bersama-sama.

Nah, kembali kalau untuk konteksnya *burden sharing*, ini karena tanggung jawab bersama, tapi yang penting untuk *burden sharing* adalah ini tiga poin juga ya, penting untuk kepentingan negara, yang kedua kondisinya itu *extraordinary*. *Nah*, yang penting di sini adalah kriteria dan ukurannya jelas. Jadi ini dukungan dari Komisi XI waktu itu sangat luar biasa kepada seluruh kementerian yang terlibat, sehingga kita bisa sama-sama mengatasi ini dan *by the end of the day* semua bisa mencapai tujuan bahkan kita lebih baik dari berbagai negara yang mengalami Covid itu, dan yang ketiga tidak kalah pentingnya untuk *burden sharing* ini adalah harus disertai oleh *exit policy*, harus jelas *exit policy*-nya kapan ini keluar, jadi atau kapan kita selesaikan ini. Jadi skenario penghentian atau normalisasinya harus kita

sepakati sejak awal. Itu yang untuk Bu Puteri dan juga beberapa pertanyaan *burden sharing* dari Pak Hidayatullah juga kalau tidak salah.

Nah, Pak Hergun ini, jadi beberapa area memang kalau kita bicara untuk sinergi tadi ya untuk dihilirisasi, hilirisasi *is game changer*. Tadi betul sekali untuk salah satu kalau kita bisa tahan atau bisa *explore* hasil ekspor ini bisa dijadikan atau diversifikasi ekspor ini bisa ditahan di kita, ini tentunya akan bisa menambah kapabilitas kita untuk cadangan devisa kita dan juga dalam pengelolaan moneter kita dan tentunya ujung-ujungnya ke nilai tukar kita.

Jadi ini tentunya kita akan dukung dan kita akan dorong, *nah* itu peran Bank Indonesia seperti tadi saya sudah ceritakan bahwa peran kita juga nanti selain riset, kajian, juga identifikasi komoditas potensial, termasuk juga mendukung untuk *clean and clear project* melalui RIRU dan beberapa nanti beberapa aspek lainnya.

Lalu pertanyaan berikutnya mengenai diversifikasi pertumbuhan ekonomi, tentunya kembali ya kita semua hilirisasi harusnya ujung-ujungnya kita membantu juga UMKM. Jadi kalau kita lihat semua industrialisasi di basis bawahnya adalah penguatan-penguatan UMKM, maka itu kesiapan UMKM juga perlu kita lakukan, termasuk juga nanti untuk *halal food* dan *fashion*. Jadi seperti kami kemukakan untuk rantai *halal food* bahkan Pak Wapres pernah mengatakan bahwa kita harusnya kuat juga di rempah ya jalur rempah ya, kita mengatakan jalur rempah juga bisa kita bangun secara syariahnya untuk halalnya terus sampai sampai ke negara-negara yang selama ini kita lakukan.

Untuk Pak Fauzi Amro, tadi sudah kita jawab untuk GNPIP-nya. *Nah*, digitalisasi SP, sekarang ini *merchant* sudah banyak Pak Fauzi ya, jadi *merchant* UMKM-nya sudah sangat banyak. Sebagian besar *merchant* yang sudah dicapai lebih dari 20 juta itu sebagian besar adalah UMKM. *Nah*, jadi betul sekali harus kita libatkan. Jadi ini saya kira menjadi *backbone* tentunya belum merata di seluruh wilayah, tapi menjadi PR kita memang tergantung infrastuktur atau dukungan dari kementerian-kementerian lain.

Untuk Pak Didi tadi inflasi sudah, regulasi yang efektif tentunya tentunya kembali ya tadi untuk pusat dan daerah salah satu bentuk kerja sama yang efektif adalah TPID TPIP tadi ya untuk kerja sama dukungan terhadap inflasi. Tentunya dukungan terhadap *growth* kita punya Rakorpusda pusat dan daerah dengan usulan-usulan hilirisasi atau *the bottlenecking* untuk sektor-sektor riil juga sudah dilakukan, termasuk pariwisata, industrialisasi dan nanti beberapa sektor lainnya. Saya kira itu untuk Pak Musthofa, jadi sudah.

Pak Primus, *nah* ini Pak Primus pertanyaannya menarik ini untuk yang industri dan pertanian ya. Jadi *case*.

Selamat sore Pak Ketua.

Untuk industri dan pertanian, betul sekali. Saya ambil contoh untuk binaan Bank Indonesia, kemarin juga kita banyak diskusi di sini. Bagaimana pertanian di daerah Sukoharjo untuk beras itu bisa dibuat industri, kenapa, karena kepemilikan lahan-lahan petani itu kita buat jadi satu hamparan atau didiskusikan menjadi satu hamparan. Kalau sudah hamparan itu industrialisasi bisa masuk. Kalau industrialisasi bisa masuk, maka akan jauh lebih efisien dan produktivitas akan jauh lebih efektif. Jadi di sini bagaimana kita salah satu contoh mengintegrasikan pertanian perindustrian karena ini adalah hulu dan hilir. Jadi seperti waktu diskusi FGD kemarin bahwa hilirisasi pangan menjadi PR kita untuk kita bereskan sama-sama, termasuk hasil survei dan seterusnya.

Bu Wartiah, untuk GNPIP tadi saya sudah jelaskan ya Pak Ketua, Pak Dolfie. Untuk suku bunga global, jadi saya mengatur nilai tukar hilirisasi, sinergi, inovasi, saya kira sudah ini.

Nah, pertanyaan Pak Eriko untuk yang karir ke depannya. Betul Pak 60 sampai 70 sekarang mendekati 70% malah Pak, sekarang jangan-jangan sudah 70%. SDM Bank Indonesia adalah milenial dan Gen Z, ini memang jadi persoalan kita ya. *Nah*, pola pikir kita untuk milenial Gen Z adalah pola pikir yang bagaimana cepat tadi kan, cepat, berkualitas, tapi penuh dengan *digital mindset* ya.

Struktur organisasi yang sekarang kita punya memang harus segera *di-review* ya. Jadi kalau pertanyaan Bapak sekarang ini sudah masuk untuk digitalisasi *re-engineering business process* yang digital. Jadi bayangkan kalau kita bicara mengenai *artificial intelligence* untuk individu orang, maka arah ke depan ini harusnya pendekatan adalah *role*, kita harus *define role* dulu peran karena kalau kotak itu mengurangi makna kita, misalnya kita mampu bekerja 1, 2, 3 tapi karena dikotakkan kita hanya bisa 1, *nah* itu bisa bikin frustrasi anak-anak muda itu. Jadi harusnya nanti *role*, tapi kan kita ikat dengan *clear clarity* dari *business process*, jadi *re-engineering business process* yang ujung-ujungnya tentunya bicara *decision making process*, penguatan *governance*, dan peningkatan *performance*. Itu menjadi hal yang sangat, kan harus tiga. Jadi ini yang penting kita harus garisbawahi.

Nah, kembali ke mata uang tadi ya. Jadi mata uang ini kan cerminannya tadi kan bukan emas lagi, tapi adalah aktivitas perekonomian. Jadi aktivitas perekonomian adalah mencerminkan mata uang kita.

Nah, kembali masalah *trust* ya, jadi harusnya memang tetap pegangannya adalah *central bank*, *clear*, jadi kalau *crypto* nanti sekarang ini kan *crypto* kadang kita untung kadang anjloknya luar biasa ya. Jadi harus *central bank*. Jadi apa lagi nanti supaya mengindahkan juga ada *shadow banking* dan *whatever* lah nanti banyak, belum kita bicara mengenai APU PPT ya untuk *money laundering* dan seterusnya. Jadi memang harus *central bank*. Jadi CBDC adalah salah satu solusi dengan Garuda Project kita.

Untuk DHE TD valas memang betul Pak. Jadi kalau kita sudah dorong hilirisasi, jangan tanggung-tanggung kita harus setuju dengan Bapak

Presiden. Jadi sudah, kita semua kerahkan *effort* kita, upaya kita untuk bagaimana devisa itu bisa ditarik ini atau solusinya ada di valas itu DHE, tentunya bertahap ya Pak ya. Nanti tahap pertama masih tentang bank sentral, nanti pelan-pelan akan ke perbankan dan seterusnya karena intinya adalah kompetisi di suku bunga. Jadi kalau seperti kita mau menyimpan investasi, pasti kita *pengen* menyimpan di investasi yang lebih baik, tentunya dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi.

Saya kira itu Pak, kalau yang dapat kami serahkan kembali ke Pak Dolfie, ke Pak Kahar sebagai Ketua Komisi XI.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Dwi atas tanggapan terhadap apa yang menjadi atensi Bapak-Ibu Anggota. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Pak Dwi akan menjadi pertimbangan dan penilaian dari yang terhormat Bapak-Ibu Anggota dalam memutuskan.

Atas nama Pimpinan Ketua Pimpinan dan Anggota Komisi XI, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dwi, sekaligus permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama *fit and proper test* sore hari ini. Demikian Pak Dwi, nanti kami akan mengabari apa keputusan dari Komisi XI. Ya Pak Dwi bisa meninggalkan tempat kalau ada pantun lagi Pak silakan.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (Ir. DWI PRANOTO, MBM.):

Karena *enggak* mau kecolongan *enggak* usah ada pantun lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih untuk Pak Dwi.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (Ir. DWI PRANOTO, MBM.):

Ada pantun lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak.

CALON DEPUTI GUBERNUR BI (Ir. DWI PRANOTO, MBM.):

Ini pantunnya sebenarnya harusnya di FGD kemarin, tapi ya sudah *enggak* apa-apa sekarang saja.

Sungguh indah bentangan alam nusantara,
Terhampar elok dari Sabang sampai Merauke,
Jika berdiskusi tentang urusan bangsa dan negara,
Memang Komisi XI lah mitra yang paling *oke*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dwi.

Bapak-Ibu kita akan lanjutkan dengan rapat internal, nanti Pak Ketua yang memimpin.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.58 WIB)

Jakarta, 13 Februari 2023

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.
NIP. 197106131998032003